



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



## SAMBUTAN KEGIATAN SEMINAR INTERNASIONAL MENYONGSONG ASEAN COMMUNITY TAHUN 2015

BEKERJASAMA DENGAN



**UNIVERSITY  
OF MALAYA**  
*The Leader in Research & Innovation*



INTERNATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT  
(Institut Antarabangsa Polisi Awam dan Pengurusan)



UNIVERSITAS  
INDONESIA



The Asia Foundation





# SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BAPAK TJAHJO KUMOLO

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,*

*Yang terhormat Bapak Try Sutrisno*

*Yang terhormat Tun Musa Hitam*

*Yang terhormat Para Delegasi Pemerintahan Kerajaan Malaysia*

*Yang terhormat Rektor IPDN*

*Yang terhormat Para Guru Besar IPDN*

*Yang terhormat Para Guru Besar Universitas Indonesia*

*Undangan dan Peserta Seminar serta Praja IPDN yang saya banggakan*

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama dalam suasana persaudaraan yang hangat untuk mempererat hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia yang begitu penting artinya bagi kita semua.

Merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menerima kunjungan Yang Amat Terhormat Tun Musa Hitam beserta delegasi dari Pemerintahan Kerajaan Malaysia dan kehormatan tak terhingga saya sampaikan kepada bapak Try Sutrisno yang berkenan hadir memberikan arahan dan masukannya dalam penyelenggaraan seminar ini, terutama kesiapan Indonesia-Malaysia menyongsong ASEAN COMMUNITY Tahun 2015 mendatang



Hadirin yang Terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, apabila dibandingkan hubungan Indonesia dengan negara tetangga yang lain, hubungan Indonesia dengan Malaysia tergolong paling rawan konflik. Padahal Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang begitu dekat, baik secara geologis maupun antropologis. Sejak masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan di zaman dahulu sekalipun, keduanya sudah memiliki keterikatan, misalnya hubungan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Melayu yang wilayahnya di sekitar Malaysia. Jarak antara hubungan kedua negara muncul di zaman kolonial yang menyebabkan hubungan kedua negara menjadi sedikit renggang. Indonesia lama dijajah oleh Belanda, sedangkan Malaysia lama dijajah oleh Inggris. Perbedaan dari zaman kolonial ini mempengaruhi latar belakang masing-masing negara, sampai akhirnya hari ini kedua negara tersebut berdiri dengan identitas yang berbeda.

Berdasarkan fakta sejarah, Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan satu rumpun, dimulai dari nenek moyang yang sama yakni ras Malayan Mongoloid. Hubungan kedua negara sejak dulu sudah sangat erat dan intensif terutama di wilayah Selat Malaka. Kedua negara pun dulu adalah satu menjadi satu bagian kerajaan yaitu kerajaan Majapahit.

Sebenarnya, persoalan yang mengganggu hubungan Indonesia-Malaysia lebih banyak disebabkan oleh ketidakpahaman, ketidaktahuan, salah pengertian (*misunderstanding*), dan salah persepsi (*misperception*), padahal sebelum penjajah datang ke Nusantara yang di Malaysia disebut “*Alam Melayu*”, kawasan ini adalah satu kesatuan politik dan budaya yang tidak terpisahkan. Migrasi ribuan penduduk tersebut ke Tanah Semenanjung pada masa dahulu memberi implikasi sosial politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di kawasan itu. Oleh karena penduduk Malaysia khususnya Melayu memiliki kesamaan dengan Indonesia, timbulah gagasan Ibrahim Jacoob yang disetujui Bung Karno untuk menggabungkan Indonesia-Malaysia menjadi satu negara dalam “*Indonesia Raya*” sebagaimana dikemukakan Asvi Warman Adam. Akan tetapi, gagasan itu gagal diwujudkan sebelum Malaysia merdeka.

Saat ini pemerintah Indonesia harus melakukan langkah strategis dalam mencegah kembali timbulnya konflik klaim budaya dengan Malaysia. Pertama, memaksimalkan peran diplomasi *negara (state diplomacy)*. Jika selama ini diplomasi antara kedua negara lebih mengandalkan ‘hubungan kekeluargaan’, sudah saatnya bagi pemerintah RI untuk menerapkan diplomasi yang berbasis profesionalisme. Artinya, diplomasi kekeluargaan tetap dilibatkan, mengingat identitas Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun bangsa Melayu. Namun, idealnya, itu harus diikuti kekuatan mumpuni diplomasi Indonesia.



Kedua, memaksimalkan peran diplomasi rakyat (citizen diplomacy). Selama ini, Indonesia-Malaysia telah memiliki semacam wadah kebudayaan bersama yang beranggota budayawan-budayawan penting kedua negara. Didirikan pada Januari 2008 pasca konflik klaim reog dan lagu Rasa Sayange, Eminent Group Person (EGP) tersebut berupaya meminimalkan terjadinya sengketa serupa. Namun, dengan terjadinya insiden tari pendet, tampaknya, EGP harus lebih mengoptimalkan upaya mereka sebagai stabilisator kerja sama budaya Indonesia-Malaysia, termasuk menjalin komunikasi intensif di antara anggotanya.

Dewasa ini, diplomasi untuk mempertahankan kebudayaan tidak dapat lagi kita gantungkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hal itu disebabkan kinerja lembaga pemerintah yang menaungi masalah tersebut, seperti Kementerian Kebudayaan ataupun kedutaan kita di luar negeri, tidak pernah menunjukkan indeks prestasi yang optimal dalam memperkenalkan budaya kita ke dunia internasional. Dengan kata lain, saat ini diplomasi negara tidaklah cukup. Bangsa ini memerlukan konsep diplomasi baru, yakni Total Diplomasi.

Total Diplomasi menekankan satu konsep bahwa masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari satu negara. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat harus dilibatkan dan menyadari keterlibatan kita dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam hal membangun citra dan mempertahankan budaya Indonesia. Pada titik inilah konsep Total Diplomasi harus disadari oleh masyarakat kita, yakni kesadaran bahwa apa pun yang kita lakukan akan terpantau oleh dunia internasional dan pada akhirnya akan turut menyumbang citra Indonesia di mata dunia, tidak terkecuali dengan kebudayaan Indonesia.

Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah menginventarisasi setiap aset budaya yang dimiliki oleh bangsa ini dan melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan tidak lagi dipandang sebagai warisan sejarah belaka, tapi dijadikan keseharian dan identitas diri maupun bangsa. Dengan demikian, kita akan terhindar dari sikap reaksioner tanpa visi. Di sisi lain, kita pun tidak perlu khawatir dengan klaim negara lain terhadap warisan budaya kita karena publik internasional tidak dapat dengan gampang dikelabui dan bisa menakar dengan tepat siapa sebenarnya pemilik budaya tersebut.



Hadirin yang Berbahagia,

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan daya saing bangsa mengarungi era persaingan global sudah sangat urgensi. Perguruan tinggi memerlukan otonomi dan independensi untuk dapat memulihkan perannya keluar dari menara gading dan terlibat langsung sebagai *agent of change* dalam perubahan masyarakat. Posisi sebuah perguruan tinggi pada barisan perguruan tinggi terbaik memerlukan perubahan yang fundamental sehingga mampu bersaing (*better competitive situation*). Sebuah perguruan tinggi harus memiliki *strategic intent*. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan transformasi kelembagaan yang lebih kompleks dari sekadar pengembangan organisasi (*organization development*) serta dibangun komunitas akademik yang bersifat kolegal, dan menjunjung tinggi *academic value* untuk mencerdaskan bangsa.

Perguruan tinggi di dunia saat ini perlu melakukan perubahan fundamental untuk dapat menghasilkan nilai-nilai akademik, sosial, dan ekonomi yang merupakan kata kunci dalam transformasi sebuah perguruan tinggi. Transformasi kelembagaan ini mencakup penyesuaian atau penancangan ulang dari strategi, struktur, sistem, *stakeholders relation*, *staff*, *skills (competence, style of leadership, dan shared value)*. Upaya transformasi kelembagaan ini diharapkan dapat merevitalisasi peran perguruan tinggi agar mampu berperan secara optimal dalam mewujudkan *academic excellent for education, industrial relevance, contribution for new knowledge, dan for empowerment*.

Munculnya kesadaran (*awareness*) bahwa Indonesia saat ini memerlukan perguruan tinggi yang dapat diandalkan dalam kompetisi global merupakan faktor penting dalam memulai suatu perubahan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pendidikan memperoleh 20% dari APBN merupakan peluang untuk melakukan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, diperlukan keberanian untuk melakukan perubahan, *do the right thing, right at the first time* merupakan semboyan yang harus didengungkan. Perguruan tinggi harus mengembangkan dirinya dan menyerap keterampilan *management best practice* sehingga dapat menjalankan *good university governance*.



Wacana-wacana di atas yang melatarbelakangi perlunya transformasi perguruan tinggi pada era kompetisi global saat ini. Pemikiran bagaimana menempatkan pendidikan tinggi sebagai ujung tombak perubahan bangsa sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Berulang kali para pembuat kebijakan pendidikan tinggi dihadapkan pada pilihan-pilihan antara pemerataan pendidikan atau pengembangan pusat keunggulan (*centers of excellence*). Oleh karena itu, strategi pengembangan pendidikan tinggi diarahkan pada pemberian peluang kepada perguruan tinggi yang mempunyai potensi dan kapasitas untuk mengembangkan dirinya meraih keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan akademik atau yang sering kita sebut *academic excellence*.

Pencapaian *academic excellence* dalam artian di atas menjadi panduan dalam pengembangan manajemen mutu dan upaya meningkatkan mutu menjadi tanggung jawab dari setiap anggota sivitas akademika.

Hadirin yang Terhormat,

Peran Diplomasi antar perguruan tinggi sesama anggota ASEAN dalam era globalisasi saat ini sangat penting. Hal ini tidak kalah pentingnya dengan operasi militer, bahkan era saat ini di tengah kebijakan *soft power*, maka diplomasi terutama kebudayaan sangat diperlukan. Keberhasilan diplomasi kebudayaan sangat berdampak positif dan jangka panjang bagi kepentingan nasional. Bahkan sebagian besar negara-negara di kawasan ASEAN memanfaatkan aset sosial budaya untuk mengimplementasikan diplomasi budaya dengan negara-negara lain di belahan dunia. Penerapan strategi kebijakan dalam diplomasi budaya tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas guna mempermudah mencari solusi terhadap kerumitan hubungan ekonomi politik yang sering terjadi berkaitan dengan daya saing dan krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi di tingkat regional.

Hadirin yang saya Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para tokoh terkemuka dari Indonesia dan Malaysia. Para tokoh yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Para tokoh yang memiliki komitmen yang tinggi untuk pembangunan dialog kesejarahan bagi kepentingan bersama di masa depan. IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri mempunyai fungsi sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, yang harus bermanfaat bagi pengembangan perguruan tinggi tersebut dan masyarakat.

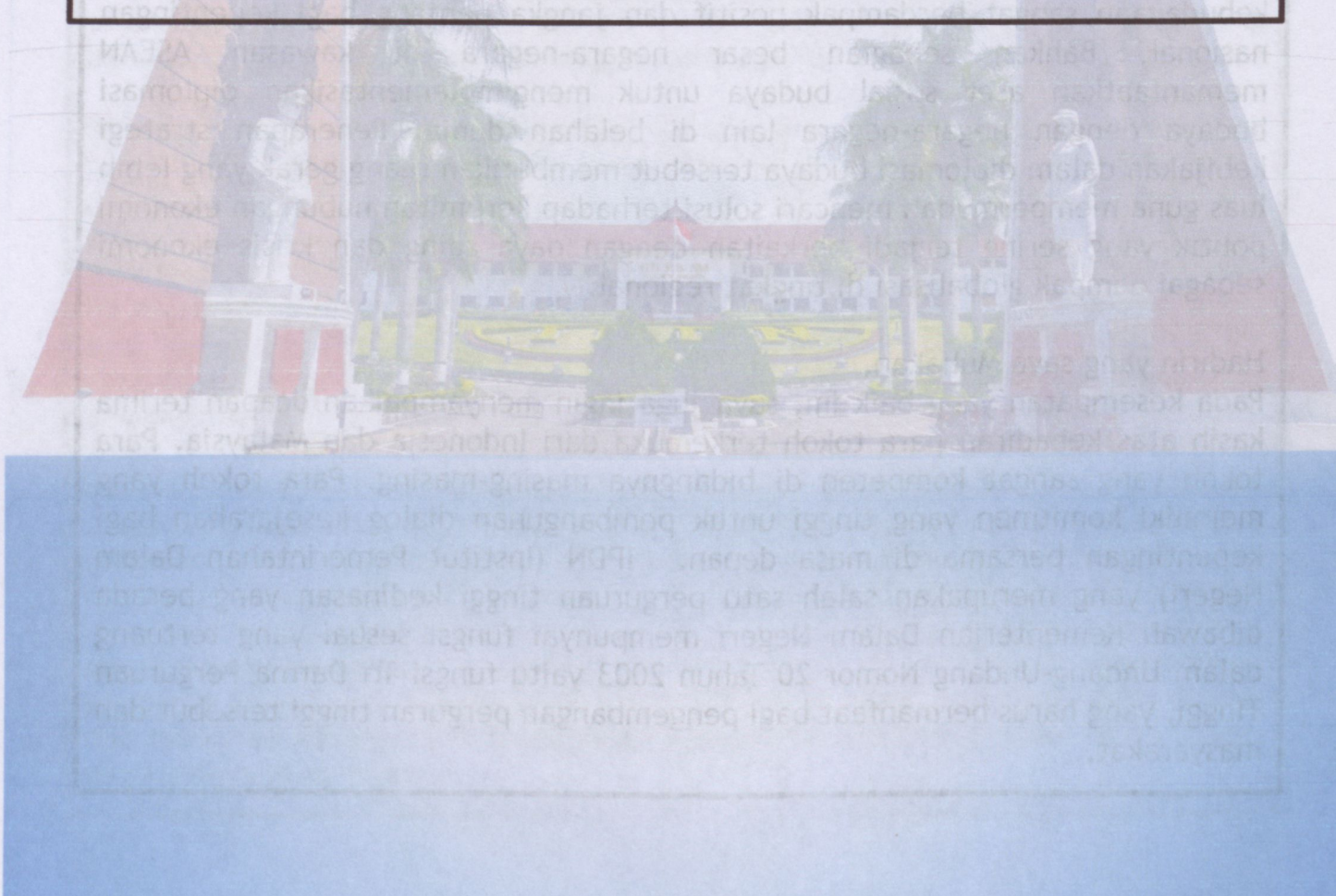


UM (*University of Malaya*) adalah perguruan tinggi tertua di Malaysia, yang sejarah awal pendiriannya pada tahun 1949 dari peleburan *King Edward VII College of Medicine* dan *Kolej Raffles*, untuk memenuhi perubahan dalam pendidikan tinggi di Malaysia serta menjawab tantangan menghasilkan lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas di Malaysia. Bahkan peran aktif UI (*Universitas Indonesia*) dalam pembentukan IMAN (*Indonesia-Malaysia Academic Network*) dalam rangka menjaga hubungan baik dan kerjasama Indonesia-Malaysia, khususnya kerjasama akademik dalam menyongsong kesiapan Indonesia-Malaysia menghadapi *ASEAN COMMUNITY* Tahun 2015 mendatang.

Mari kita percayakan amanah dan harapan besar ini kepada para tokoh kedua negara untuk melaksanakan dialog yang sehat terbuka dan insya Allah membawa manfaat bagi kedua bangsa serta menjaga hubungan baik Indonesia-Malaysia ke depannya, dan tetap saling menghargai persamaan dan perbedaan kedua negara.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.







# SAMBUTAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si.

Merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menerima kunjungan Yang Amat Terhormat Tun Musa Hitam beserta delegasi dari Pemerintahan Kerajaan Malaysia, Universiti Malaya, *The Asia Foundation* dan *International Institute of Public Policy and Management (INPUMA)*. Yang Mulia sudah tidak asing lagi bagi Indonesia, karena Yang Mulia memiliki peran yang aktif dalam membangun dan memajukan persahabatan dan hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Disamping itu, Yang Mulia juga memiliki banyak sahabat di Indonesia dan saya pun secara pribadi sangat menghormati Yang Mulia. Oleh karena saya mempunyai keyakinan, bahwa dengan peran serta Yang Mulia, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia akan semakin maju dan kokoh.

Ucapan terima kasih kami sampaikan tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Try Sutrisno (Mantan Wakil Presiden RI) yang telah berkenan hadir dan memberikan pengarahan tentang bagaimana negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia berperan aktif dalam menyongsong ASEAN Community 2015 mendatang, serta tindakan-tindakan pro aktif yang dapat dilakukan Indonesia-Malaysia guna mempererat hubungan kedua negara. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada para Narasumber lainnya termasuk dari Universitas Indonesia, perwakilan dari PEMDA Sulawesi Selatan, para perwakilan Universitas yang hadir, undangan lainnya, Panitia serta para peserta seminar.

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia mempunyai arti khusus dan sangat penting. Mengapa? Kita adalah negara tetangga terdekat yang memiliki persamaan latar belakang sejarah dan budaya. Kesejahteraan, keamanan, dan kemajuan bangsa kita sudah saling terkait satu sama lain. Kerjasama kita menjaga kelancaran navigasi dan keamanan di Selat Malaka misalnya berpengaruh besar bagi perekonomian dunia dan bagi stabilitas kawasan. Sementara itu, kerjasama Indonesia dengan Malaysia juga merupakan pilar penting bagi stabilitas dan kemajuan ASEAN.

Hubungan bilateral kita terus dikembangkan dengan semangat saling menghormati, saling melengkapi, dan saling membawa manfaat bagi kedua negara. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia menyentuh begitu banyak kalangan masyarakat dan berbagai aspek kepentingan, serta berada dalam intensitas yang tinggi, sehingga sangatlah wajar jika dalam perjalanannya kadang timbul riak-riak antara kedua negara.

Ada empat variabel 'ideational' penting yang berkaitan dengan sumber identitas kolektif ini, yakni *interdependence*, *common fate*, *homogeneity*, dan *self-restraint*. Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri dalam membentuk identitas, melainkan secara bersama-sama. Kekuatan dari identitas kolektif demikian bergantung pada intensitas dari gabungan faktor-faktor ini. Berkaitan dengan identitas kolektif ini, perlu dibicarakan juga pengetahuan bersama (*common knowledge*) dan pengetahuan kolektif yang merupakan sumber inspirasi bagi identitas Malaysia. Salah satu *common knowledge* yang berkembang adalah cita-cita tentang 'Malaysia Boleh', 'New Asia', 'Malaysia Truly Asia' dan konsep-konsep lain yang menjadi wacana untuk mendorong kesiapan Malaysia untuk bersaing di dunia global. Malaysia seperti banyak negara lain di era globalisasi tidak bisa terlepas dari struktur peranan untuk mempersiapkan diri bersaing sebagai agen globalisasi. Pemahaman tentang aspek identitas terakhir ini yang perlu dikaji untuk melihat bagaimana Malaysia meletakkan hubungannya dengan Indonesia dari aspek kebudayaan.



## A. Identitas Kolektif Indonesia - Malaysia

### 1. *Interdependence*

Proses pergeseran makna tentang kesalingtergantungan ini dimulai sejak tahun 1980-an. Para pekerja Indonesia misalnya, tidak dilihat sebagai yang melengkapi pembangunan Malaysia. Kontribusi dari para pekerja ini semakin tidak dihargai bahkan berkembang proses sekuritisasi terhadap para pekerja terutama terhadap para pekerja ilegal mereka yang sebelumnya dianggap memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan budaya di Malaysia, bahkan dalam beberapa laporan memberikan kontribusi bagi bertambahnya proposi orang Malaya di sana, mulai dimaknai sebagai ancaman bagi keamanan nasional (*national threat*).

### 2. *Common Fate*

Dalam kaitan dengan hubungan Indonesia-Malaysia, perasaan tentang nasib bersama ini menguat hanya pada saat-saat awal kemerdekaan terutama ketika kedua negara mempersiapkan kemerdekaan. Nasib sebagai negara terjajah telah mempersatukan semangat kedua bangsa untuk saling membantu. Semangat akan nasib bersama ini dicerminkan juga dan besarnya pengaruh pemikir-pemikir Indonesia di Malaysia mulai dari kelompok pemikir Islam sampai dengan para nasionalis.

### 3. *Homogeneity*

Aspek homogenitas dalam identitas kolektif Indonesia dan Malaysia adalah yang paling kuat. Kedua Negara memiliki sejarah, budaya, hubungan kekerabatan dan famili yang kuat. Kesamaan yang ada itu menyebabkan hubungan kedua negara sering disebut dengan istilah hubungan dua negara serumpun, hubungan kakak adik dan hubungan dalam suka dan duka. Kedua negara mempunyai akar historis kerajaan yang sama, kemudian karya-karya sastra Melayu yang sama. Persamaan budaya antara orang Melayu di kedua negara paling terasa di hampir semua daerah Melayu Malaysia dan di daerah, seperti Sumatera serta sebagian Kalimantan di Indonesia.

Dalam perjalanannya, konsep kekerabatan pada awalnya paling konkret ditafsirkan oleh para pejuang kemerdekaan kedua negara. Para tokoh ini bersimpati satu dengan lainnya dalam melawan penjajah pada tahun '40-an di Malaysia, ada misalnya para '*entrepreneurs*' yang membentuk semacam '*epistemic communities*' seperti Burhanudin At-Helmi Ibrahim Yakoob, Ahmed Boestaman, Mokhtaruddin Lasso; dan, di Indonesia Muhammad Yamin, Mohammad Hatta dan Sukarno yang membidangkan tentang bentuk kerjasama negara merdeka di Nusantara. Walaupun masing-masing kelompok mengajukan penamaan yang berbeda, yakni Melayu Raya, Indonesia Raya dan kemudian juga Nusantara, di baliknya ada asumsi bahwa mereka adalah serumpun, Istilah Dunia Melayu menggambarkan lebih kuat lagi kedekatan *kindship* ini. Dalam bidang pemikiran keagamaan HAMKA misalnya dipandang sebagai pemikir besar yang sangat berkesan bagi umat Islam di Malaysia. Mereka ini adalah para pemikir yang peduli pada nasib pribumi yang tertindas dan memberikan insprasi bagi pembebasan dan kemajuan.

Sebagaimana kita ketahui, negara ASEAN yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam, Burma, Laos dan Kamboja dalam babak baru memasuki percaturan geo-ekonomi dan geo-politik global. Salah satu keputusan strategis negara-negara ASEAN adalah menjadikan ASEAN sebagai pilar *Community* yang meliputi ASEAN *Economic Community*, ASEAN *Security Community* dan ASEAN *Socio-Cultural Community*, yang akan dicanangkan pada tahun 2015 mendatang. Hal ini sebagai implementasi dari jalinan keakraban antara negara-negara ASEAN dalam rangka mencanangkan ketiga pilar, yakni pilar sosial budaya, pilar ekonomi dan pilar politik keamanan.



Pembentukan *ASEAN Community* tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan dalam lingkup regional maupun global. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan sebagai respon bahwa negara-negara ASEAN sebagai pusat perkembangan ekonomi dan politik yang paling pesat dan aman untuk investasi.

Tantangan terbesar dalam menghadapi hal tersebut adalah Malaysia dan Indonesia harus berbenah diri dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dan berkualitas global. Terutama tantangan Indonesia kedepan adalah mewujudkan perubahan dalam bentuk Revolusi Mental masyarakatnya dalam mewujudkan ekonomi dan sosial yang layak agar Indonesia siap segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN.

Sejalan dengan hal itu, isu-isu yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi dan amat mendasar berasal dari lingkungan strategis Perguruan Tinggi tersebut. Pokok permasalahannya adalah disebabkan tidak adanya kesesuaian atau mismatch antara harapan masyarakat sebagai '*The Real World*' dengan respon Perguruan Tinggi terhadap harapan-harapan masyarakat tersebut. Oleh karena itu agar tuntutan masyarakat yang semakin besar tersebut dan signifikan dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Community*, merupakan tanggung jawab bersama dari Perguruan Tinggi di Indonesia, Malaysia maupun perguruan tinggi di asean dalam mewujudkan dan mengawasi kualitas lulusannya. Hal ini diasumsikan bahwa Perguruan Tinggi (termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), dalam hal ini IPDN) sebagai organisasi sistem terbuka dan dipandang sebagai industri jasa pelayanan. Artinya perguruan tinggi dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan pelayanan dan memuaskan *stakeholder* dan *user-nya*. Kualitas dalam pendidikan bukanlah *goods* tetapi *services*. Kualitas harus memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan semua pemakainya. Manajemen pendidikan tinggi diposisikan sebagai industri pendidikan dan sebagai industri jasa yang harus memenuhi standar dan kualitas. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan Indonesia terutama IPDN terhadap *ASEAN Community* 2015 mendatang pembangunan SDM di IPDN lebih difokuskan pada: 1) *Continuous Improvement*: IPDN senantiasa memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan lingkungan strategisnya; 2) *Quality Assurance*: IPDN menentukan standar kualitas yang digunakan serta diimplementasikan pada semua unit-unit kerja dalam proses pendidikannya; 3) *Changes of Culture*: IPDN senantiasa membentuk dan mengembangkan budaya akademik organisasi yang menjadikan kualitas sebagai orientasi dalam proses pendidikannya; 4) *Upside and Down Organization*: IPDN dalam visi dan misi serta tujuannya selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai lingkungan strategisnya; 5) *Keeping Close to the Customer*: IPDN menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan lingkungan strategisnya baik lokal, nasional maupun global.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.





# SAMBUTAN BAPAK TRY SUTRISNO

## A. Pendahuluan

*“Bekerjasama lebih baik daripada sendiri, karena bila yang satu kurang, maka ada yang melengkapi”.*

Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Pencipta, telah menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai dua Negara yang bertetangga dan mempunyai akar budaya yang sama. Walaupun terdapat perbedaan antara Indonesia dan Malaysia didalam proses menjadi Negara merdeka, namun hal itu juga adalah kehendak Tuhan, karena hal tersebut juga dapat memperluas wawasan kita didalam melihat kondisi yang berkembang di Negara masing-masing.

Bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa posisi strategis Indonesia dan Malaysia cukuplah penting di dalam memelihara kondisi yang kondusif bagi perkembangan di Asia Tenggara, khususnya di dalam menyongsong MASYARAKAT EKONOMI ASEAN “(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)” pada tahun 2015.

Oleh karena itu, kita sangat menghargai adanya upaya kerjasama antara IPDN dengan INPUMA didalam melakukan seminar bersama untuk memperoleh masukan yang dapat disumbangkan kepada Negara masing-masing, maupun untuk ASEAN.

Kita yakin bahwa hasil kajian bersama akan lebih baik daripada kajian sendiri-sendiri, apalagi hal-hal yang terkait dengan kedua Negara.



## **B. Visi dan Misi**

Di dalam mengembangkan seminar ini sebaiknya ada acuan visi dan misi yang dapat menjadi pedoman dalam pengembangan konsep kerjasama dimasa depan.

### **1. Visi**

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera di Indonesia dan Malaysia yang dilandasi saling percaya dan menghormati sesama Negara yang bertetangga.

### **2. Misi**

#### **a. Penelitian bersama**

Untuk memperoleh hasil yang lebih obyektif, sebaiknya dibentuk suatu tim bersama untuk mempelajari secara mendalam berbagai bidang atau sektor yang perlu dikembangkan.

#### **b. Seminar bersama**

Untuk memperkaya hasil penelitian yang sudah dilakukan bersama, maka perlu diadakan seminar bersama dengan mengundang para ahli diberbagai bidang yang berkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **c. Program bersama**

Sebagai wujud kerjasama dari kedua Negara didalam menangani berbagai masalah, maka perlu adanya beberapa program bersama yang dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di Malaysia.

## **C. Tantangan Kini Dan Masa Depan**

### **1. Perkembangan Lingkungan strategis**

Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, maka tantangan yang dapat terjadi dimasa kini dan dimasa depan cenderung akan semakin rumit dan dapat berpengaruh kepada hubungan diantara Negara yang bertetangga.

Menghadapi terbentuknya "Masyarakat Ekonomi ASEAN" tahun 2015, maka dapat diperkirakan tantangan dibidang ekonomi dan bisnis akan semakin besar pula.

Oleh karena itu diharapkan kerjasama penelitian di bidang pengembangan kebijakan Ekonomi dan Bisnis mendapat prioritas yang tepat.

### **2. Keamanan Regional dan Internasional**

Untuk mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 yang akan datang, maka perlu adanya kesiapan tiap Negara didalam memelihara Keamanan Nasional masing-masing yang terintegrasi secara harmonis didalam mewujudkan keamanan regional dan internasional. Perlu disadari bahwa ASEAN berada didalam posisi strategis yang menjadi salah satu pusat kegiatan Ekonomi dan Bisnis yang semakin pesat dimasa mendatang, terutama menghadapi perkembangan di kawasan Asia dan Pasifik.



## **D. Strategi dan Program**

### **1. Strategi**

#### **a. Dasar**

Sesuai kondisi masing-masing Negara, maka perlu adanya pertukaran strategi dasar masing-masing, agar dapat menjadi bahan masukan bagi pihak lain didalam penyesuaian strategi dimasa mendatang.

#### **b. Sinergi**

Adalah menjadi harapan kita, apabila dapat dirumuskan senergi dari strategi kedua Negara didalam meningkatkan efektifitas pemerintahan kedua Negara didalam menghadapi kondisi masyarakat yang semakin dinamis.

### **2. Program**

#### **a. Bersama**

Melalui kajian dan persiapan yang matang, maka perlu dirintis adanya program bersama dalam beberapa proyek yang sudah siap sehingga wujud kerjasama dibidang akademik dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

#### **b. Unggulan**

Disamping adanya program bersama, maka perlu juga dikembangkan adanya program unggulan masing-masing sesuai kondisi tiap Negara sehingga dapat menjadi bahan perbandingan didalam pembangunan program bersama.

## **E. Harapan dan Pesan**

Sebagai pribadi yang pernah aktif didalam pemerintahan dan mengikuti kerjasama yang terus berkembang diantara Indonesia dan Malaysia, saya mengharapkan agar seminar ini dapat memberi masukan yang cukup obyektif dan tulus kepada kedua Negara, sehingga bermanfaat didalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Mengingat kerjasama antara IPDN dan INPUMA ini baru dirintis, maka sebaiknya dirumuskan lebih dahulu bentuk kerjasama tersebut dengan mengembangkan beberapa pemikiran tentang visi, misi, strategi, program maupun hal-hal lain yang menjadi pedoman didalam kegiatan selanjutnya.

Belajar dari pengalaman masa lalu dan harapan dimasa mendatang, saya memberanikan diri untuk memberi beberapa masukan untuk menjadi bahasan pada acara seminar ini.

Mungkin juga sudah ada konsep dari IPDN maupun INPUMA, sehingga masukan ini dapat melengkapi yang sudah ada.

Melalui acara seminar ini saya menyampaikan pesan, agar kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh terpenggil untuk menjalin kerjasama melalui berbagai lembaga maupun kegiatan kita masing-masing, demi masa depan Indonesia dan Malaysia maupun ASEAN yang lebih baik.

Terima Kasih





# SAMBUTAN PROF. EMERITUS Dr. BENNY HOEDORO HOED

## Menyegarkan Kembali Hubungan Indonesia-Malaysia Sebuah catatan awal

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua. Oom santi santi.

### 1. Pendahuluan

Hubungan Indonesia-Malaysia sudah lama terjalin. Hubungan ini telah mengalami pasang-surut atau panas-dingin sejalan dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di kedua negara jiran ini. Pengetahuan kita tentang sejarah hubungan kedua bangsa ini penting untuk kita ketahui guna belajar dari kesalahan dan kebaikan yang telah terjadi. Secara khusus, dalam paparan ini saya akan berbicara tentang masa depan, yakni penyegaran, pemerkuatan, dan pendalaman hubungan antara kedua negara ini. Dalam kaitan ini, saya mencoba melihat kemungkinan jalan yang terbuka melalui jalur akademis.

Pada tahun 2008 kedua pemerintah membentuk The Eminent Persons Group (EPG) yang terdiri dari 14 tokoh terkemuka di Indonesia dan Malaysia, masing-masing terdiri dari 7 orang. EPG Indonesia dipimpin oleh Bapak Try Sutrisno, sedangkan EPG Malaysia dipimpin oleh Tun Musa Hitam. Upaya ini dimaksudkan agar kelompok ini memulai membangun hubungan *"people-to-people"* antara kedua bangsa. Saya sempat diikutsertakan dalam pertemuan lanjutannya yang terdiri atas berbagai perwakilan unsur masyarakat di kedua negara. Pertemuan berlangsung terbuka dan berhasil memberikan saling pengertian antara kedua pihak. Setelah itu tidak terdapat lagi pertemuan lanjutan, atau setidaknya saya tidak pernah mendengar lagi adanya pertemuan serupa. Namun, saya mendengar pula bahwa secara terpisah-pisah telah terjadi berbagai kegiatan pada kalangan intelektual yang membicarakan berbagai aspek hubungan Indonesia-Malaysia. Pertemuan-pertemuan tersebut saya pandang sebagai kelanjutan pertemuan EPG yang setelah itu memang tidak dilanjutkan karena tugasnya telah usai.



## **2. Kesenjangan Antargenerasi**

Sebagai salah satu pelaku kegiatan “pascakonfrontasi” dalam rangka normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, saya telah merasakan keakraban hubungan antara kami di Indonesia dan kawan-kawan Malaysia yang pada tahun 1966 masih berusia antara 30 dan 50 tahun. Kami berupaya untuk mengembangkan komunikasi untuk mempererat hubungan kedua bangsa setelah dipaksa bermusuhan sebagai akibat dari persoalan politik di antara para pemimpin kita masing-masing.

Upaya itu tidak hanya antarpemuda atau kalangan akademik, tetapi juga di ranah media. Saya masih ingat adanya acara siaran televisi bersama. Di Malaysia dan Indonesia para sastrawan bertukar pengalaman dan karya mereka. Di bidang seni lainnya terjadi pertukaran seniman dan ciptaan mereka. Di bidang pendidikan tinggi tenaga dari lembaga pendidikan tinggi Indonesia mengisi kekosongan tenaga pengajar di perguruan tinggi. Masih banyak yang dapat diutarakan di sini, saya hanya menyebutkan sebagian kecil saja untuk menggambarkan betapa akrab hubungan kedua bangsa selepas Konfrontasi.

Namun, sejak akhir tahun 80-an keadaan berubah. Kedua bangsa, khususnya di kalangan generasi muda, seakan-akan tidak lagi saling mengenal. Di Indonesia suasana politiknya seakan tidak mepedulikan perlunya ada hubungan yang lebih akrab daripada sekadar menjadi sebagai anggota komunitas ASEAN. Bahkan ditengarai adanya kecenderungan untuk saling mencurigai. Di kalangan kita di Indonesia bahkan ada sebagian masyarakat yang ingat kembali pada “semangat konfrontasi”. Saya juga mendapat kesan bahwa di kalangan muda Malaysia ada pandangan yang melihat Indonesia sebagai semacam ancaman terhadap hari depan bangsanya. Akhirnya, generasi muda di kedua negara ini melihat hubungan Indonesia-Malaysia sama saja seperti hubungan dengan negara anggota ASEAN.

Hal ini tentunya sangat disayangkan. Hubungan Indonesia-Malaysia mestinya lebih mendalam daripada hubungan dengan anggota ASEAN yang lain.

## **3. Belajar dari Uni Eropa**

Apa yang harus kita lakukan? Izinkanlah saya, sebelum memasuki paparan tentang saran pemikiran saya, untuk menyampaikan pengalaman saya tentang Eropa. Bertahun-tahun saya mengikuti perkembangan di Eropa, khususnya Uni Eropa. Sebagai pengamat perkembangan di Uni Eropa, khususnya di bidang kebudayaan, saya melihat sesuatu yang mungkin berguna untuk kita perhatikan. Sejak beberapa tahun, Uni Eropa mempersiapkan suatu “suprastruktur budaya” untuk hari depan bangsa-bangsa Eropa. Generasi muda diajak untuk merasa “Eropa” dan sekaligus “Italia”, “Prancis”, “Jerman” atau bangsa-bangsa anggota Uni Eropa yang lain. Untuk itu, mereka membangun infrastruktur budaya yang dapat menjadi pendukung upaya menjadikan generasi muda menjadi “merasa Eropa”, tetapi tidak kehilangan identitas negara dan bangsanya masing-masing. Infrastruktur budaya itu, antara lain, penghapusan batas keimigrasian dan bea cukai antarnegara anggota yang membebaskan lalu-lintas warga, pembentukan bank sentral Eropa, peluncuran mata uang Euro, pembentukan politik bahasa, pembentukan Universitas Eropa di sejumlah negara anggota, dan Program Studi Kajian Eropa.



Saya sadar bahwa keadaan kita di kawasan Asia Tenggara tidak sama dengan Eropa. Akan tetapi, saya merasa bahwa kita di ASEAN memiliki sumber budaya yang dalam hal tertentu serupa. Paling sedikit, kita perlu mengajak generasi penerus kita untuk memahami bangsa sendiri dan bangsa lain yang menjadi tetangga kita, khususnya Malaysia. Kawasan yang sekarang bernama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia bahkan Singapura, Thailand, Kamboja, dan Laos pernah dikenal sebagai kawasan "budaya Nusantara". Kita semua dan generasi penerus perlu diberi pengetahuan tentang ekonomi, sejarah, kesenian, dan kehidupan sosial budaya negara tetangga kita. Dari pengamatan saya, saya belum melihat upaya pengenalan ini dilakukan secara sistematis dan terencana, baik melalui pendidikan formal maupun media.

Secara khusus, generasi muda kita perlu diperkenalkan dengan kebudayaan dan peri kehidupan bangsa Indonesia dan Malaysia agar dapat terjalin saling mengerti demi kehidupan bertetangga dan bersaudara yang sehat. Kita perlu membuka kembali jalur komunikasi budaya yang sudah sejak lama dibangun, khususnya selepas masa Konfrontasi, oleh generasi yang sekarang sudah berusia di atas 65 tahun.

#### **4. Jalur Akademik sebagai Infrastruktur Budaya**

Seperti telah saya kemukakan, kalau kita melihat ke belakang, sebetulnya yang menjadi tulang punggung hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia adalah kaum cendekia, termasuk kalangan akademik. Ketika Konfrontasi berakhir bersamaan dengan kelahiran Orde Baru, pada bulan November tahun 1966 - 48 tahun yang lalu -- saya mendapat kehormatan untuk memimpin rombongan olah raga mahasiswa Universitas Indonesia untuk berkunjung ke Malaysia. Kunjungan ini merupakan simbol yang memperlihatkan niat baik Indonesia untuk mengakhiri Konfrontasi. Rombongan ini terdiri dari 80 mahasiswa 79 menurut The Straits Times Singapura (lihat lampiran) yang sebagian di antaranya sekarang sudah menjadi pengajar di UI atau perguruan tinggi lainnya atau pun duduk di birokrasi dan dunia swasta. Sebagian besar di antara mereka mestinya sudah memasuki masa pensiun atau telah tiada.

Setelah itu, komunikasi antarmahasiswa dan tenaga akademik menjadi meningkat. Bahkan di antara media pun terbangun hubungan yang harmonis. Saya masih teringat siaran televisi bersama di Jakarta dan Kuala Lumpur. Ini berkat hubungan dan saling pengertian yang terjadi di kalangan - sebut saja - "generasi tua". Sayangnya hubungan pada ranah cendekiawan ini tidak dikembangkan secara sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, tidak terjadi regenerasi. Akibatnya, sejak tahun 80-an sejarah dan usia manusia telah melemahkan hubungan ini, bukan karena kaum cendekia tidak mau meneruskannya. Mereka yang masih saling menyapa seperti saudara banyak di antaranya yang sudah ditelan usia. Banyak di antara mereka yang tidak lagi memiliki peran yang menentukan dalam kehidupan sosial politik. Ternyata tidak terjadi regenerasi pengetahuan dan semangat persaudaraan pada generasi selanjutnya. Kedua bangsa, khususnya generasi penerus, seakan tidak saling mengenal dan karenanya sudah tidak saling menyapa.



Oleh karena itu, INPUMA-UM dan IPDN serta UI telah mengambil prakarsa untuk menghidupkan kembali jalur cendekiawan, khususnya kalangan akademik, dengan harapan dapat membentuk infrastruktur budaya yang dapat menopang hubungan positif antara kedua bangsa. Upaya ini saya beri nama "menyegarkan kembali hubungan Indonesia-Malaysia". Dalam beberapa kali pertemuan dengan rekan-rekan di INPUMA-UM bersama dengan sejumlah teman sejawat di Universitas Indonesia dan di IPDN, saya memahami bahwa kita harus membangun hubungan yang lebih sistematis dan terstruktur di antara para cendekiawan, khususnya akademisi. Hubungan ini tidak sekadar saling mengunjungi, tetapi membangun suatu infrastruktur budaya. Bangunan yang saya bayangkan harus dimulai dengan membuka jejaring akademis. Jejaring itu telah dikemukakan oleh Profesor Bambang Wibawarta, yaitu "Indonesia-Malaysia Academic Network", disingkat IMAN. Secara kebetulan singkatannya IMAN. IMAN dalam agama berarti keyakinan akan Tuhan dan ajaran agama. Dalam konteks ini, IMAN berarti kesetiaan dan kepercayaan akan suatu cita-cita: hubungan persaudaraan yang positif dan saling menguntungkan antara kedua bangsa, Indonesia dan Malaysia. Perlu dicatat bahwa upaya ini merupakan salah satu lanjutan dari prakarsa The Eminent Persons Group atau EPG yang dipimpin oleh Bapak Try Sutrisno dan Tun Musa Hitam yang berada di antara kita.

Dalam bayangan saya, IMAN merupakan suatu infrastruktur budaya yang menjadi forum tempat memikirkan dan mengembangkan cara-cara untuk membangun hubungan positif dan saling menguntungkan bagi hari depan kedua bangsa, khususnya dalam konteks ASEAN. Perguruan tinggi bukanlah sekadar tempat untuk menjadikan orang pandai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi - seperti lembaga pendidikan lainnya -- adalah tempat terjadinya regenerasi budaya. Lulusan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia, merupakan generasi penerus yang akan mengemudikan negara dan bangsa kita masing-masing. Mereka akan menjadi bagian dari kelas menengah di negara masing-masing. Kita ketahui, kelas menengah merupakan generator yang biasanya membawa bangsa dan negara ke hari depan. IMAN dengan demikian harus menjadi tempat memikirkan bagaimana melakukan regenerasi pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan akan perlunya membina hubungan persaudaraan antara kedua bangsa.

Jalur yang dapat dibangun adalah (1) kerja sama di bidang pendidikan, seperti menyusun kurikulum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan di kedua negara; (2) pertukaran mahasiswa, baik di bidang kesenian, olah raga, maupun pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi, atau pun kewirausahaan (*entrepreneurship*); (3) pemberian beasiswa untuk pendidikan tentang Indonesia dan Malaysia pada tingkat Pascasarjana; (4) pertukaran pengajar dan peneliti dalam kajian tentang Indonesia dan Malaysia; dan (5) pemberian pemahaman kepada masyarakat luas di negara masing-masing dalam bentuk kegiatan sosial, seminar, atau pun lokakarya tentang pentingnya hubungan positif, saling menguntungkan, dan persaudaraan antara kedua bangsa.



Upaya ini dapat dimulai dengan perguruan tinggi yang sudah mempunyai hubungan, seperti UM, UI, dan IPDN. Dengan cara ini, IMAN membangun proses regenerasi yang pada tahun 80-an sempat terputus oleh sejarah dan usia. Dengan IMAN kita membangun sejarah baru guna menyegarkan kembali hubungan Indonesia-Malaysia. Demikianlah, beberapa pemikiran saya yang diharapkan dapat membuka jalan untuk kita bersama menyegarkan kembali hubungan Indonesia-Malaysia yang telah dirintis oleh para tokoh EPG, Bapak Try Sutrisno dan Tun Musa Hitam.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warakhmatullahi wabarakatuh.*





# SAMBUTAN WAKIL REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH., MS., MH.

## World Class University in the ASEAN Community Era

### Introduction

The acceleration of the establishment of an ASEAN Community from 2015 to 2020 was approved at the ASEAN Summit in Cebu, Philippines, in January 2007 and was also stated in the "Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015" (ASEAN Secretariat, 2008:5). The establishment of the ASEAN community has been agreed earlier in the ASEAN Vision in Kuala Lumpur in 1997 which was later confirmed in the ASEAN Concord II, the 9<sup>th</sup> ASEAN Summit in Bali in 2003. The ASEAN Community is comprised of three pillars: (1) ASEAN Political and Security Community, (2) the ASEAN Economic Community, and (3) ASEAN Social Culture Community.

With the formation of the ASEAN Community and the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, universities which aspire to be World Class Universities will face both opportunities and challenges. ASEAN Community brings with it a variety of consequences which requires universities in ASEAN countries to determine the steps necessary to survive and thrive by updating their visions, missions, strategies as well as their development orientations. The objective of the establishment of the ASEAN Community is the formation of communities who share one vision and ASEAN identity. Meanwhile, the formation of ASEAN Economic Community aims to create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and effectively integrated with trades and investments, capital and freedom of movement of business persons and labors. Its influence in the business (and the education) world encompasses five basic freedoms: free flow of goods, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, and free flow of skilled professional workers (cf. KPMG Asia Pacific Tax Centre, 2014:4).

AEC prioritize seven sectors: agriculture industry, electronics, fisheries, rubber-based industry, the wood-based industry, textile-based industry, as well as five service sectors: air transportation, health care, tourism, logistics, and information technology industry (e-ASEAN). The 12 priority sectors in the ASEAN Economic Community should be considerations in determining the policies and directions of higher education, as well as their regulations and relevant academic and non-academic programs.



### **Quality Readiness and Competitiveness of Higher Education**

The impact of ASEAN Political and Security Community, the ASEAN Economic Community, and ASEAN Social and Cultural Community as well as globalization is that local universities will have to upgrade the qualities of their academic and non-academic programs and their competitiveness in both ASEAN and international levels. For that reason, the governance of higher education will require qualified human resources capable of establishing cooperation with other institutions both domestically and abroad.

Running and managing a university like usual (business as usual) is no longer enough. Top managements of universities need to find some breakthroughs, and to think out of the box (cf. H.A.R Tilaar, 2012:21). This is crucial because many problems and challenges that have yet been predicted will emerge in the near future. Therefore, creativity, innovation and invention which may come from universities become highly desirable in order to survive and grow from uncertainties.

With the implementation of the ASEAN Economic Community in 2015, the movement of skilled professionals in the ASEAN countries will be inevitable. Exchange of professors in the ASEAN community will become a reality that must be faced by all local universities. Without a doubt, universities in Indonesia would be flooded with professional experts from abroad, which at the same time create the same opportunity for Indonesian professionals to move and work in ASEAN countries. The competitions among Indonesian professionals and university graduates which previously happened within the country will intensify as foreign professionals enter the country. Moreover, the local professors might also be tempted to work at foreign universities which offer better compensations and facilities.

The readiness of local universities to deliver better services and to give more competitive benefits, facilities, and infrastructures to professional professors and lecturers will guarantee on-campus human resource stability. On the other hand, if local universities are unprepared, it will make their existing professors and professional lecturers turn to foreign universities that offer more opportunities to develop.

The quality of higher educations can also be measured through the readiness of their graduates to thrive in an environment with intense market competitions (cf. Haryono, 1999:1). The measurement encompasses the duration for fresh graduates to find employments, their positions in the companies, their professional developments while carrying out their works, and the capabilities of graduates in creating more job opportunities for other people (entrepreneurship). All of these can only be achieved if all actors and components at universities which include good governance, faculty members, students, learning process, student to faculty ratio, the clarity of regulations, the education model and the use of technologies in learning process function properly and optimally.



### **Strategy of Higher Education Institutions**

The Globalization era, the formation of the ASEAN Community, the implementation of the ASEAN Economic Community, the subliminal free market concept in the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) and the advancement of technology make the world of higher education more open hence affecting their operational activities. Like it or not, the wave of change and transformation within national higher education would have to be embraced and implemented so that the local universities can continue to survive and grow in the global environment.

University strategy in mental revolution is done through developing a good governance that addresses the needs for better quality and service under intense competitions, such as a more innovative and creative governance by delegating more authority and empowerment to fundraising and financial management units. Improving the quality of higher education require the fulfillment and improvement of infrastructures, such as laboratories, and qualified human resources. Universities should also empower supporting units that generate (short-term and long-term) profits and the units that can broaden networking with other universities or industries. Good quality education demands strong commitment, heavy investments in facilities and infrastructure, and qualified human resources.

A clear university positioning is required to face the onslaught of changes in economics, politics, educations and socio-culture. Local universities should also equip their human resources with necessary knowledge in digital technology, e-learning, telecommunications and electronics and information technology. Local universities with their social responsibility programs should also be able to provide a planned and discipline process of education and to consider changes in knowledge, the use of information technology, the surrounding community, locally and internationally.

The clarity of university positioning as the center of science and development of future professionals capable of creating more job opportunities requires the commitment of the education providers as well as the consistency of agreed visions, missions, goals, strategies and sustained working synergies. By doing so, local universities will be more competitive; their quality of education will be well-known by the public at the national level, ASEAN and beyond. Moreover a trustworthy university would eventually become the people's choice both locally and internationally.

### **Competence, Expertise and Basic Skills**

The dynamics of "survival of the fittest" in the world of higher education has spawned a wide variety of self-defense mechanisms to deal with the intense competition, the plurality of situations and difficult times. Multi-dimensional crisis has provided many lessons for the world of higher education so that they will not make the same mistake. Therefore, competency-based education which presupposes mastery of knowledge and skills need to be accompanied by a mastery of basic skills, good mentality, and social sensitivity. Basic skills, character, mentality and social sensitivity will avoid higher education being reduced to the typical narrative teaching which less emphasize on character, social sensitivity and explorative attitude.



The competencies of university graduates which are expected to be in line with their disciplines are essentially the result of mastery of the teaching materials and good educational process. Teaching materials, curriculum, learning and assessment system aim at competencies acquired at the end of the learning process. Philosophically, it fits with the concept of "Educare" which emphasizes on the provided content and teaching materials. The attempt to put more emphasize on the content, curriculum and teaching materials should also be integrated with the concept of "Educere" in the philosophy of education. "Educere" prefers the mentoring process that accentuates the guidance, motivation, encouragement and empowerment so that students develop optimally in accordance with the interests and talents of each individual.

The mastery of competencies occurs via a higher education atmosphere which promotes freedom to explore one self and to develop newly discovered ideas. The role of faculty members is to serve as a facilitator, a resource person, and a motivator for students. For professional lecturer at universities are expected to perform the followings (cf. Junaedi Utomo (Ed.), 1999:2-3):

1. Mastery of teaching materials.
2. Readiness and willingness to motivate students.
3. Ease of access to resources.
4. The maintenance of relations with the outside world to broaden the academic horizon.
5. The empowerment of reciprocal communication.

Competency, qualification, expertise and skills will empower university graduates to get a better job or to create more job opportunities. The competency and expertise that they possess should be accompanied by some basic skills so that graduates will be reliable individuals in their personal and professional lives. The basic skills include mastery of foreign languages (such as English), adapting skills, the ability to work in a team, honesty, discipline, work ethic and the ability to market their competencies, talents and abilities.

### **Education and Culture Strategy**

In the midst of competition in the ASEAN Community and the ASEAN Economic Community, higher education strategies should also consider local cultures and their uniqueness as the sand box. Without a culture that is deeply rooted in people's lives, the local universities have in fact lost one of their competitive advantages and also their true identities. University graduates should not only be equipped with excellent competencies but also with the power of culture and the ability to constantly adapt with changes. Globalization and recent competitions in (proving better) quality should not sacrifice local human resource and most importantly, the students as the center and the subject of education. Therefore, university students should not be sacrificed as the university attempts to achieve high university ranking. Universities are therefore not to be reduced as a mere mean of pursuing worldwide higher education ranking. Humans are placed in accordance with their dignity as a central point in the education system. Similar point of view has also been confirmed by H.A.R. Tilaar in his book entitled "Some National Education Reform Agenda in the Perspective of 21st Century" (1998:3).



In the midst of consumerism and hedonism that gives a birth to an "instant" culture among our youngsters, universities should also include the teachings of character and wisdom as part of the desired competencies. This is crucial considering that the globalization era and various competitions it brings have made many people led by their emotions and subconscious forces that draw them to instant lifestyle (the desire to acquire everything in a quick and easy way), glamour and concerns with outward appearance only. Thanks to companies with their persuasive advertisements and marketing efforts which shape our mindset, values, and perspectives about life.

The alteration of the ways people look at realities around them and the never-ending desires backed up by the advancement of technology and the free market have made hedonism flourish and temporary pleasure becomes the leading factor in life. Rampant hedonism cannot be separated from the intense competitions and rivalries among individuals and corporates which in turn causes discomfort, loneliness and weaken solidarity and social sensitivity. Universities with the innovation, creativity and moral force should become a steering force by optimizing the functions of reason and consciousness. The culture of reasoning, morality and truthfulness should be nurtured on campus thus a university could also become a cultural trendsetter that upholds human dignity with all its dimensions.

Human dignity, which is also the subject of education, has a very high value because the ability to reason, intellect and consciousness are all inherent to its nature and existence. Personality of an individual also embodies the human person philosophy. Therefore, the preparation of men in systematic, formal, organized, and planned activities is called education.

Human dignity strengthens other human qualities such as responsibility, honesty, openness, justice, love, the spirit of continuous learning and the life long search for truth. Higher education institutions are therefore also the humanization and cultural institutions in which through the process of education on campus, students could develop optimally and become more humane in attitude, way of thinking and consciousness. Through the learning process that is structured and planned, students are able to appreciate their dignities and enhance their competences so that they are able to overcome their life problems independently and responsibly.

Higher education institutions should also be able to build a personal culture where knowledge, competence and skills and values are internalized. Through this internalization process, students are able to master the knowledge and skills that they desire and make them as an integral part of their lives and their works. Personal culture includes the ability to utilize the advancement of information technology to build one's network and creativity, in order to advance in life.

Personal culture generated through the learning process on campus should also include multi-cultural insights and perspectives that enable and enhance adaptation and team work skills. The creation of peaceful learning environment where students learn to respect and tolerate each other and the habituation-conditioning scenarios would be effective means for character formation and personal culture.



### **The Utilization of Advanced Information Technology**

Globalization era, ASEAN Economic Community and the post-industrial society have caused transformations of mindsets and lifestyles. The competitions supported by free market concept have caused insecurity, individualism, and temptation to put personal interests above all others. Thanks to the advancement of information technology, today's people have new ways of looking at previously considered taboo situations and also new ways of life.

According to Daniel Bell, the transitions from industrial society to an information one produce changes in the types of products that are traded. Product-dominated businesses will shift towards service-dominated businesses, such as those that offer information, knowledge, and networking. Information service in the form of advertising, marketing, IT and public relations has become a very important element in education.

In information society, providers of knowledge and information technology services will play a much bigger role than ever. Therefore, those who master information technology will have greater power and bigger influence. Information society is signified as having an interdependence relationship, global interdependence and a way of life akin to a network model. Networking technology presupposes skills to attract stakeholders in order to improve the education quality at universities.

The use of social media, the internet, television, networks, teleconferencing, e-learning in the learning process have opened new possibilities in which everything in the educational system will move at a rapid pace, more efficient and practical. The assignments of academic tasks, the monitor of the study results and the learning process will be effortless. Interactions between faculty members and their students will be sharpened, intensified yet more convenient.

In the development of the information society, the advancement in telecommunications technology, electronic products, internet and Smartphone, etc. will open new opportunities and possibilities that were once thought to be impossible. In fact, these days even our children are familiar with high tech products (technology savvy). The overflowing of information without a moment for critical reflection, analysis, reasoning and deep understanding will influence their thoughts and how they experience the realities around them. The mastery and implementation of ICT in higher education institution will in turn affect the teaching and learning processes and will produce a new learning methodology that is more empowering.

ASEAN Community is just around the corner. The blueprint of the ASEAN Community prepares all ASEAN members to synchronize their orientations on 3 levels simultaneously by the end of 2015: (a) Politics and Security, (b) Economic, and (c) Socio-Cultural.



Although the aforementioned opinions prevalent among state officials and the business community, but the reality in our society speaks differently; approximately 80% of our people do not understand where the ASEAN Economic Community will lead them to, with about 15% of our people who think they understand the general idea of AEC, and only about 5% who are able to engage in dialogue about Indonesia and ASEAN's development. The following section will assess the readiness of universities in Indonesia to address the development of the AEC, as well as offering some initiatives that can be addressed by the State Universities (PTN) and Private Universities (PTS) in Indonesia.

### **Current Developments**

Nowadays we can see many professionals from Malaysia, Philippines, Singapore, India, and Australia who seek fortune in Indonesia, particularly in areas such as education, management, transportation, banking, information services, technology, and insurance. In some private universities today, the abovementioned groups have been working professionally, complying with the legal system in Indonesia, and easily mingling with fellow professionals from Indonesia.

Foreign professionals have also forayed into some business sectors favored by our local educated workers, such as banking and telecommunications sectors. In contrast, very few Indonesians are able to work in equivalent business sectors in the home countries of those foreign professionals, such as becoming teachers, managers, consultants, and technicians.

In the retail sector, we can find an increasing number of foreign wholesalers and retailers such as Carrefour, Makro, Lotte, Giant, and Farmers. We can easily spot many products from outside Indonesia are being displayed on the selves, while the local products are tucked away in the corner. The point is many retailers sell foreign products that we can manufacture in our own country. Meanwhile, our people who are less critical are unable to distinguish the national products, the national products which are packaged abroad and returned to Indonesia with new added values, and non-ASEAN products which are packaged outside Indonesia.

In the transportation sector, we will have a similar picture. If we sit in an airport lounge in Vietnam, the Philippines, Singapore and Malaysia, we would pause watching the airlines such as Singapore Airlines, Malaysian Airlines, and AirAsia, can easily enter and leave foreign airports within ASEAN; lift and drop off passengers with passports from countries in ASEAN. On the contrary, our own airlines both public and private have not been able to fly to all ASEAN countries routinely, unlike foreign airlines.

In the midst of this uncertainty, unfortunately, we are one year shy from ASEAN Economic Community 2015. We can not reject foreigners from ASEAN countries who wish to work in our country, and compete with our children in careers and professions, including finding employments in the high technology sector. Logically, the foreign-owned companies would likely choose workers from their home countries because of their cultural proximity and similar fate as immigrants, wouldn't they?



In higher education sector, ASEAN countries recognize an institution called the ASEAN University Network, which allows cooperation among universities in the areas of teaching and research. Although the membership of this new intuition is currently limited to several leading universities, but there are some expectations from local public and private universities to also become members.

It is expected that the ASEAN University Network will be more aggressive with the emergence of AEC hence allowing many universities to collaborate and work closely in the ASEAN region. At the same time, it is very possible for foreign universities to educate local universities to adapt with their uniqueness. In this case, it opens the possibility for foreign universities to bring their faculty members and students to engage in a variety of field researches we used to do in the country, such as exploring our forests to study the peculiarities of certain plants for the advancement of science based on their own version.

#### **Internal Initiatives for Higher Education Institutions in Indonesia**

First, State Universities (PTN) and Private Universities (PTS) should carefully select and tailor their curriculums to fit with several criteria: professionalism, globalization, national development, and the Principal of Scientific Pattern (PIP), in order to produce a more forward-looking curriculum. There should be a clear objective, for example to produce graduates who are able to work in various technical sectors, services, and management, in Indonesia and abroad.

Second, local universities should prepare and direct the campus bureaucracy to improve the accreditation rating, let's say from C to B, from B to A, and to continuously improve the quality of education, research, teaching, and community service, so that the accreditation rating improves on the next period. Therefore, universities need to work closely with the Ministry of Education and Culture, in order to really understand the assessment criteria for accreditation, including getting accustomed to taking care of educational documents in their respective campuses.

Third, local universities should synergize their activities with the government at the provincial/ district/city level, especially in relations with the on-the-job training programs or internships. One of the benefits of this program is that universities will have fresh graduates who already know about the real working environments.

Fourth, local universities should prepare existing lecturers for Master and Doctorate programs in various disciplines in order to ease the process of establishing graduate and postgraduate programs on their own campuses.

#### **External Initiatives for Higher Education Institutions in Indonesia**

In addressing the inflow of foreign workers which potentially foray our middle low sectors, it is time for universities in the country to collaborate with the national business world, to prepare for the certification of vocational high school graduates and Diploma 1/2/3, particularly on areas of public interests such as the automotive, agricultural, engineering, electrical, construction, banking, insurance, and healthcare. These certifications should also consider the expertise, qualification and skills required for students who prefer to work in the country, as well as the inclusion of foreign languages such as English and Mandarin, for those who wish to work abroad.



By relying on a highly targeted and objective-based curriculum, universities should work closely with ministries in the country to take part in preparing Indonesian citizens for working abroad. This can be done by increasing the quality and quantity of the teaching of Information Technology as well as English and Mandarin in High Schools and Vocational Schools, so that in the future our country will have a workforce capable of working in foreign-owned businesses. Based on our observations on some private universities (PTS), the introduction of appropriate teaching materials for 4 semesters may produce future graduates who are able to work and communicate in English and Mandarin.

As a great nation, it is also a perfect time for us to incorporate a new culture so that we are able to compete fairly in our own country and in other ASEAN countries. As for the said new culture includes (a) decision-making by consensus; (b) professionalism at work; (c) respecting law, morals, ethics, and procedures at work; and (d) getting accustomed to work across cultures with fellow citizen. For that matter, there is an opportunity in managerial training services, especially for future leaders of companies, state officials, and community organizations.

Synergizing university activities with corporate demands have become mandatory thus the state and private universities should intensify their internship programs that prepare Indonesian students physically and mentally to work and face global challenges in the future, including understanding the technology that is being practiced today. Internship programs allow graduates to work together across cultures, and to explore the complexity of today's working environments.

#### **Closing Remark**

Although the ASEAN Community is getting closer and bringing about risks and challenges, it is expected that the synergy between local governments and citizens can maintain the independence of the nation, as well as improving the achievements we have gained today. The synergy should be institutionalized in public policies conducted at central and provincial levels, and should be socialized as much as possible in Indonesia and ASEAN scopes.





# SAMBUTAN

## Khadijah Md. Khalid Shakila Yacob



### HUBUNGAN MALAYSIA - REPUBLIK INDONESIA: SATU TINJAUAN AWAL PERSEPSI GENERASI MUDA DI REPUBLIK INDONESIA

#### Pengenalan

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi perkembangan politik semasa di kebanyakan negara pada hari ini adalah faktor generasi muda. Statistik terkini mencatatkan hampir 25 peratus (iaitu 1,776.7 juta) daripada jumlah populasi dunia terdiri daripada golongan muda berumur antara 15-30 tahun. Kita sedia maklum bahawa antara cabaran utama kerajaan masa kini, baik di negara maju dan juga di negara membangun, adalah mengurus aspirasi, kehendak dan tuntutan semasa orang muda dalam konteks ketidaktentuan politik dan ekonomi global.

Memandangkan golongan muda membentuk satu kelompok masyarakat yang begitu besar di kebanyakan negara membangun di seluruh dunia, khususnya di Asia, Afrika dan Timur Tengah, peranan serta pengaruh mereka haruslah diambil kira dalam penggubalan serta pelaksanaan polisi termasuklah dasar luar negara. Golongan muda berkemampuan membentuk pendapat umum (public opinion) yang penting dalam konteks negara yang mendukung prinsip demokrasi dan kepimpinan politik yang mementingkan partisipasi rakyat dalam penggubalan dasar.

Kertas kerja ini bertujuan untuk meninjau persepsi golongan muda Republik Indonesia (selepas ini Indonesia) terhadap Malaysia dan juga pandangan mereka mengenai hubungan dua hala negara mereka dengan Malaysia pada masa kini serta hala tujunya dalam konteks keserantau ASEAN. Kajian ini merupakan hasil tinjauan awal (survei) pandangan orang muda di Indonesia terhadap Malaysia dan hubungan dua hala Malaysia - Republik Indonesia. Antara aspek utama dalam hubungan ini yang akan turut dibincangkan adalah sejarah sosiobudaya, kepimpinan politik dan ekonomi.

Kertas kerja ini juga bertujuan untuk menilai sama ada aspek sejarah dan sosiobudaya atau isu-isu semasa lebih meninggalkan kesan ke atas persepsi golongan muda Indonesia terhadap hubungan Malaysia -Indonesia. Seandainya isu semasa memainkan peranan penting dalam mempengaruhi persepsi generasi muda, persoalan yang boleh dibangkitkan adalah, sejauhmanakah media "bebas" Indonesia berperanan dalam mempengaruhi persepsi golongan muda negara itu terhadap negara jirannya, Malaysia?



Ini adalah kerana, apabila timbul sesuatu isu yang berkaitan dengan Indonesia yang dibangkitkan (dan kadangkala digembar-gemburkan oleh media negara itu), akan berlakunya demonstrasi di hadapan Kedutaan Malaysia di Jakarta dan juga serangan bertulis ke atas rakyat dan juga kerajaan Malaysia melalui media perdana dan media sosial oleh rakyat negara itu. Berbeza dengan “media terkawal” di Malaysia, reformasi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah memperkenalkan demokrasi sepenuhnya di negara tersebut yang membawa kepada kebebasan akhbar yang mutlak. Seringkali sentimen atau persepsi golongan muda dikaitkan dengan peranan media.

Persoalan kedua merujuk kepada aspek kepimpinan politik yang melibatkan hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Apa yang menarik adalah untuk kita meninjau bagaimana generasi muda Indonesia mentafsir aspek ini dalam menentukan hala tuju hubungan dua negara tetangga ini. Begitu juga dengan kedudukan hubungan kedua-dua negara tersebut dalam konteks kepentingan serantau terutama sekali dalam menghadapi ASEAN Community 2015. Hubungan ekonomi Malaysia-Indonesia, khususnya dari segi pelaburan dan peranan syarikat multinasional Malaysia dalam pembangunan ekonomi Indonesia, akan turut dibincangkan dalam kertas kerja ini.

Kertas ini bermula dengan sorotan literatur yang menyentuh berkenaan kajian sedia ada yang merujuk kepada persepsi generasi muda dalam hubungan luar antara dua buah negara. Ini diikuti dengan faktor sejarah dan sosiobudaya dalam mempengaruhi perjalanan sejarah sosio-politik dan ekonomi kedua buah negara di samping memberikan perhatian sama ada aspek ini ada mempengaruhi pandangan generasi muda Indonesia terhadap Malaysia. Seterusnya, bahagian ketiga kertas ini menilai peranan generasi muda dalam menjayakan ASEAN Community 2015. Akhir sekali, merumuskan sama ada persepsi golongan ini terhadap Malaysia mampu menentukan hala tuju hubungan kedua negara tetangga ini.

### **Sorotan Literatur**

Imej atau persepsi sesebuah masyarakat/negara mungkin dilihat sebagai suatu yang remeh dan tiada kaitan dalam pembentukan dasar luar (foreign policy) sebuah negara. Namun, apa yang menarik di sini adalah, terdapat pendapat yang menyatakan bahawa polisi antarabangsa dibentuk berdasarkan persepsi/imej sesebuah negara. Jervis (1976) merupakan salah seorang sarjana yang mengetengahkan idea tentang bagaimana penekanan persepsi yang melampau (extreme emphasis on perception and image) boleh menyebabkan misperception atau salah tanggapan. Beliau juga menekankan faktor sejarah dan bagaimana interpretasi sejarah sering kali digunakan untuk menganalisa tindakan awal sesebuah negara. Jika sesebuah negara itu tidak mempunyai persepsi yang negatif tentang negara yang lain, maka “fears and desires” akan menjadi pendorong kepada pembentukan polisi negara itu.



Setakat ini tiada banyak kajian yang dijalankan mengenai peranan generasi muda dalam hubungan antarabangsa dan diplomasi. Tinjauan awal kajian menunjukkan terdapat usaha untuk menilai persepsi generasi muda terhadap sesebuah negara yang dipengaruhi oleh interpretasi peristiwa sejarah yang membawa kepada pembentukan persepsi yang antagonistik terhadap satu sama lain. Walaupun generasi muda tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa genting atau peperangan yang telah lama berlaku, ia telah mewarnai persepsi golongan ini terhadap sesebuah negara dan sekaligus, sentimen negatif yang wujud terhadap negara tersebut. Ini amat ketara dalam kes China dan Jepun di mana perasaan benci dalam kalangan generasi muda di kedua-dua buah negara didorong oleh interpretasi yang berbeza mengenai sejarah bersama dan bukannya persaingan ekonomi atau kepentingan strategik (Yinuo Geng, 2011).

Geng juga menegaskan golongan belia Jepun dan China mempunyai interpretasi yang berbeza kerana mereka tidak mengalami peristiwa sejarah. Dalam kata lain, golongan muda tidak benar-benar memahami sejarah negara masing-masing sehingga timbulnya rasa benci terhadap satu sama lain akibat daripada kurang pemahaman dan interpretasi sejarah yang berbeza. Kajian ini menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah mengenai negara sendiri dan negara luar, boleh memberi impak negatif kepada perhubungan antarabangsa, khususnya hubungan antara negara. Adakah faktor ini juga memainkan peranan yang sama dalam mewarnai persepsi generasi muda Indonesia terhadap Malaysia, dan begitulah sebaliknya?

Satu kajian lain yang agak menarik adalah penyelidikan yang dijalankan oleh Shen dan Taylor (2012).<sup>4</sup> Kajian ini menjurus kepada pandangan generasi muda di Uganda terhadap peningkatan pengaruh ekonomi China di negara tersebut. Apa yang menarik, walaupun negara China (dari sudut geografi) adalah negara yang jauh dari Afrika tetapi negara kuasa besar Asia ini mendapat perhatian golongan masyarakat di Uganda dan rantau tersebut kerana pengaruh pelaburan China yang begitu besar di sana.

Pembabitan China dalam ekonomi Afrika merupakan satu fenomena baru yang telah menonjolkan imej negara China yang positif dan juga negatif. Walaupun negara China adalah negara yang jauh dari Afrika dan pembabitan ekonominya di sana agak baru, namun generasi muda di Uganda mempunyai persepsi yang negatif terhadap negara China. Ini adalah kerana peningkatan dominasi (*growing dominance*) negara China dalam ekonomi Uganda yang semakin ketara. Neo-kolonialisme juga dilihat sebagai satu isu besar yang mempengaruhi persepsi generasi muda di Uganda terhadap rakyat dan negara China.

Pada satu ketika dahulu imej Amerika Syarikat (AS) amat dikaitkan dengan “the Ugly Americans” kerana peranan dan pelaburan syarikat multinasional di Amerika Latin ketika kemuncak “Perang Dingin”. Rusuhan anti-Tanaka pada tahun 1974 juga dikaitkan dengan imej negatif Jepun yang sering bekerjasama dengan “cukong” Tionghua dan bukannya pribumi Indonesia dalam aspek pelaburan serta mula mendominasi ekonomi Asia Tenggara sekitar tahun 1970-an. Ringkasnya imej sesebuah negara amat penting dalam membentuk pendapat awam yang boleh mempengaruhi hubungan politik antara dua buah negara. Bagaimanakah imej Malaysia dalam kalangan pemimpin dan rakyat khususnya generasi muda Indonesia?



Persoalan yang boleh dibangkitkan di sini adalah pengaruh ekonomi Malaysia di Indonesia melalui pelaburan syarikat besar seperti Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK), Felda Global Ventures Holdings Berhad, IJM Plantations, Genting Plantations Berhad, Sime Darby Berhad, Maybank dan CIMB Bank sama ada mencetuskan rasa positif atau negatif dalam kalangan rakyat Indonesia khususnya terhadap Malaysia. Ringkasnya, imej sesebuah negara itu sama ada positif atau negatif adalah penting kerana ia mempengaruhi pendapat umum dan dasar luar serta diplomasi negara tersebut. Selain itu, dalam mengkaji hubungan antara dua buah negara aspek kepimpinan politik merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam menentukan hala tuju hubungan kedua buah negara.

Tulisan Khadijah Md. Khalid dan Shakila Yacob (2012) menunjukkan dalam perjalanan sejarah politik hubungan Malaysia - Indonesia, peranan pemimpin adalah amat penting.<sup>6</sup> Aspek ini boleh dilihat semasa pentadbiran bapa kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman dan hubungan dengan Presiden Sukarno dan juga Mahathir Mohammad (Perdana Menteri Malaysia yang keempat) dengan Allahyarham Presiden Suharto. Malahan konfrantasi Malaysia - Republik Indonesia berjaya ditamatkan hasil "goodwill" antara Tun Razak (timbalan Menteri Malaysia ketika itu) dengan Tun Adam Malik (Menteri Luar Indonesia). Hubungan peribadi antara pemimpin sangat signifikan dalam meredakan rasa permusuhan dan menimbulkan perdamaian dalam kalangan pemimpin dan rakyat Indonesia ketika itu. Begitu juga sentuhan peribadi juga dilihat memainkan peranan mendamaikan hubungan kedua negara semasa peristiwa Ambalat pada tahun 2005. Isunya di sini adalah sama ada generasi muda di Malaysia dan juga Indonesia mengerti aspek ini atau melihat isu kepimpinan ini secara objektif, sekaligus mempengaruhi persepsi mereka terhadap Malaysia.

Hubungan Malaysia dan Indonesia masa kini yang berkemungkinan besar dipengaruhi oleh kepudaran atau terhakisnya konsep keserumpunan dan ditambah lagi dengan peranan firma dan syarikat Malaysia yang semakin ketara di Indonesia sudah pasti memberi impak ke atas hubungan dua hala negara tetangga ini. Tambahan lagi, keadaan ini mungkin menjadi lebih kompleks kerana peranan media yang semakin berani tanpa mengambil kira sensitiviti masyarakat dua negara tetangga ini. Apa yang membimbangkan adalah seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yinuo Geng, 2011 tentang kurangnya pengetahuan dan pemahaman sejarah dalam kalangan belia Jepun dan China sehingga menimbulkan rasa kebencian antara masyarakat dua negara tersebut yang mungkin boleh diaplikasikan dalam konteks hubungan Malaysia dengan Indonesia. Memandangkan Republik Indonesia merupakan negara tetangga yang paling penting kepada Malaysia dengan jumlah penduduk yang ramai termasuk peratusan golongan muda yang signifikan, justeru, sudah pasti pandangan orang muda di Republik tersebut mengenai Malaysia harus diberi perhatian.



## Impak Sejarah Kolonialisme di Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak persamaan dari sudut sejarah, bahasa dan juga agama. Isu sejarah dan sosiobudaya termasuk aspek keserumpunan telah pun di sentuh oleh beberapa kajian yang dijalankan sebelum ini.<sup>8</sup> Kajian terkini oleh Clark (2014) menunjukkan kolonialisme dan nasionalisme memainkan peranan penting dalam pembentukan persepsi masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Malaysia. Clark menghuraikan bagaimana penjajah Inggeris dan Belanda bertanggungjawab memecah-belahkan kesatuan masyarakat Nusantara dan impaknya terhadap hubungan Malaysia dan Indonesia sehingga hari ini. Walau bagaimanapun, Clark tidak menyentuh isu mengenai interpretasi sejarah yang berbeza antara masyarakat kedua buah negara ini. Permasalahan bilateral di antara dua negara serumpun ini menurut Clark lebih menjurus kepada isu-isu semasa yang melibatkan layanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, tuntutan 'Ambalat' dan isu tuntutan batik. Menurut Clark lagi, media kedua-dua negara berperanan penting dalam mencorakkan persepsi semasa rakyat Indonesia terhadap Malaysia dan kadangkala isu yang dibangkitkan adalah isu remeh yang tidak sepatutnya menjadi punca perbalahan antara kedua-dua tetangga. Bagi Clark, semangat nasionalisme yang menebal dalam kalangan rakyat Indonesia juga menyumbang kepada ketegangan yang berterusan.

Isu yang seringkali menjadi tumpuan masyarakat di Malaysia, dan lebih-lebih lagi di Indonesia, adalah seperti eksploitasi dan penderaan pekerja/buruh khususnya pembantu rumah Indonesia oleh majikan Malaysia menyebabkan ketegangan antara kedua-dua negara jiran ini. Persepsi negatif atau sikap prejudis rakyat Malaysia terhadap rakyat Indonesia menyebabkan rakyat negara tersebut menyifatkan masyarakat Malaysia sebagai angkuh dan sombong kerana melihat sebahagian daripada pekerja Indonesia sebagai "trouble makers" atau punca masalah. (Holst, 2007). Mungkin terdapat kebenaran tentang sikap prejudis dalam kalangan masyarakat Malaysia, tetapi artikel ini hanya menyentuh tentang sikap negatif yang dialami oleh masyarakat Malaysia sahaja. Adakah masyarakat Indonesia mempunyai perasaan prejudis terhadap rakyat Malaysia?

Selain daripada masalah semasa seperti yang dinyatakan di atas, terdapat juga pertikaian mengenai sejarah dan budaya nusantara seperti isu Ambalat, asal-usul batik dan tarian tradisonal. Isu sosio-budaya ini menjadi isu yang sensitif antara masyarakat Malaysia dan Indonesia. Sebagai contoh, perasaan "permusuhan" semakin jelas dan boleh dilihat ketika Sukan SEA 2011 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Sebelum perlawanan terakhir antara Harimau Muda dan Garuda Muda, masyarakat Indonesia tidak memberikan penghormatan apabila lagu 'Negeraku' dimainkan sehingga menimbulkan rasa kurang senang pemain dan pegawai-pegawai rasmi dari Malaysia.

Persoalannya, apakah sebenarnya perasaan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia? Mengapakah terdapat sentimen negatif seperti ini dalam kalangan masyarakat Malaysia dan Indonesia walaupun terdapat banyak persamaan dari segi sejarah, bahasa dan budaya? Adakah konsep keserumpunan ini semakin pudar dan rapuh, justeru, tidak lagi relevan?

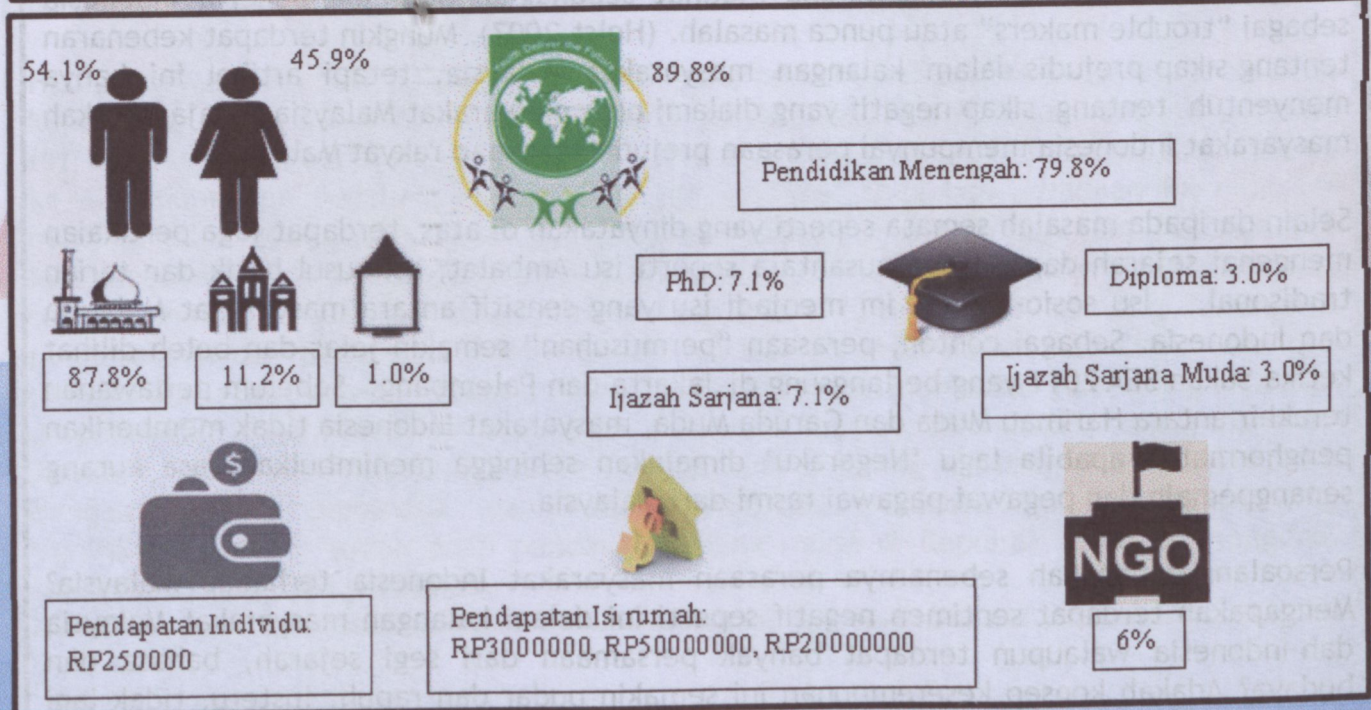


Malaysia mungkin tidak begitu disukai oleh sebahagian daripada masyarakat Indonesia bukan kerana perbezaan budaya yang ketara, tetapi kerana intepretasi sejarah yang berbeza. Perhubungan “adik-abang” yang wujud telah menimbulkan persaingan sesama sendiri sehingga menimbulkan pertikaian mengenai sejarah dan pemilikan budaya (cultural/heritage claim) seperti isu pemilikan budaya Nusantara. Menurut Kremer (2011), hubungan “adik-abang” ini sering digunakan sebagai perbandingan untuk menunjukkan negara mana yang lebih kuat atau dominan. Beliau berpandangan yang kedua-dua negara seringkali menggunakan isu warisan nusantara untuk bersaing antara satu sama lain. Jika kedua-dua negara ini sentiasa berbalah dan enggan bersatu, perbalahan ini akan membawa kesan negatif terhadap perhubungan serantau.

### Metodologi

Kertas kerja ini adalah berdasarkan satu tinjauan ringkas yang melibatkan survei yang disertai oleh 99 orang pelajar dan segelintir pentadbir daripada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Bandung, Indonesia. Pelajar IPDN merupakan bakal pentadbir di pelbagai peringkat pentadbiran tempatan dan nasional di Indonesia. IPDN merupakan sebuah badan kerajaan yang melatih para pentadbir muda di peringkat tempatan dan nasional. Pelajar IPDN direkrut berdasarkan merit dari seluruh Indonesia, tanpa mengenal latar belakang agama, etnik dan wilayah. IPDN mempunyai beberapa cawangan di seluruh Indonesia dan tinjauan ini telah dilakukan di kampus induknya di Jatinangor, Bandung.

Survei ini merangkumi empat bahagian utama yang menyentuh aspek sejarah dan sosiobudaya, kepimpinan politik serta ekonomi dalam hubungan kedua buah negara.





Responden kajian ini terdiri daripada pelajar dan staf akademik di IPDN. Majoriti responden adalah lelaki iaitu 54.1 peratus, manakala selebihnya (45.9 %) adalah responden perempuan di mana 89.8 peratus terdiri daripada golongan belia dan tahap pendidikan tertinggi adalah tahap pendidikan menengah (79.8%) berbanding segelintir sahaja yang mendapat pendidikan tahap paling tinggi iaitu Ph.D (7.1%). Ini membuktikan kajian ini menyasarkan persepsi dan pandangan orang muda yang bakal memimpin negara Indonesia kelak. Dari aspek kepercayaan agama, majoriti responden adalah beragama Islam (87.8%) dan selebihnya beragama Kristian (11.2%) dan Hindu (1%).

Pendapatan isi rumah responden adalah dalam sekitar Rp 3,000,000 hingga Rp 20,000,000 (RM 820.00 hingga RM 5,471.00). Jurnal ini menunjukkan tahap pendapatan keluarga responden adalah sederhana rendah. Dalam konteks ekonomi Malaysia, jumlah pendapatan yang diterima oleh rakyat Indonesia masih lagi rendah walaupun semua maklum akan peningkatan kelas menengah yang agak ketara kebelakangan ini. Dari aspek penglibatan politik, tiada seorang pun responden yang menganggotai parti politik tertentu. Ini mungkin kerana kebanyakan responden adalah terdiri daripada kalangan pelajar yang tidak didedahkan kepada politik kepartian. Hanya 6 peratus sahaja responden yang menjadi ahli badan bukan kerajaan (NGO). Mereka yang mendaftar sebagai ahli NGO memilih untuk menganggotai Anak-Anak Terang, Dharmawanita, Lembaga Kebudayaan Indonesia, Masyarakat Hasuhah Nusantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Porsi, Tanda Kemerdekaan, dan Lembaga Bela Keadilan.

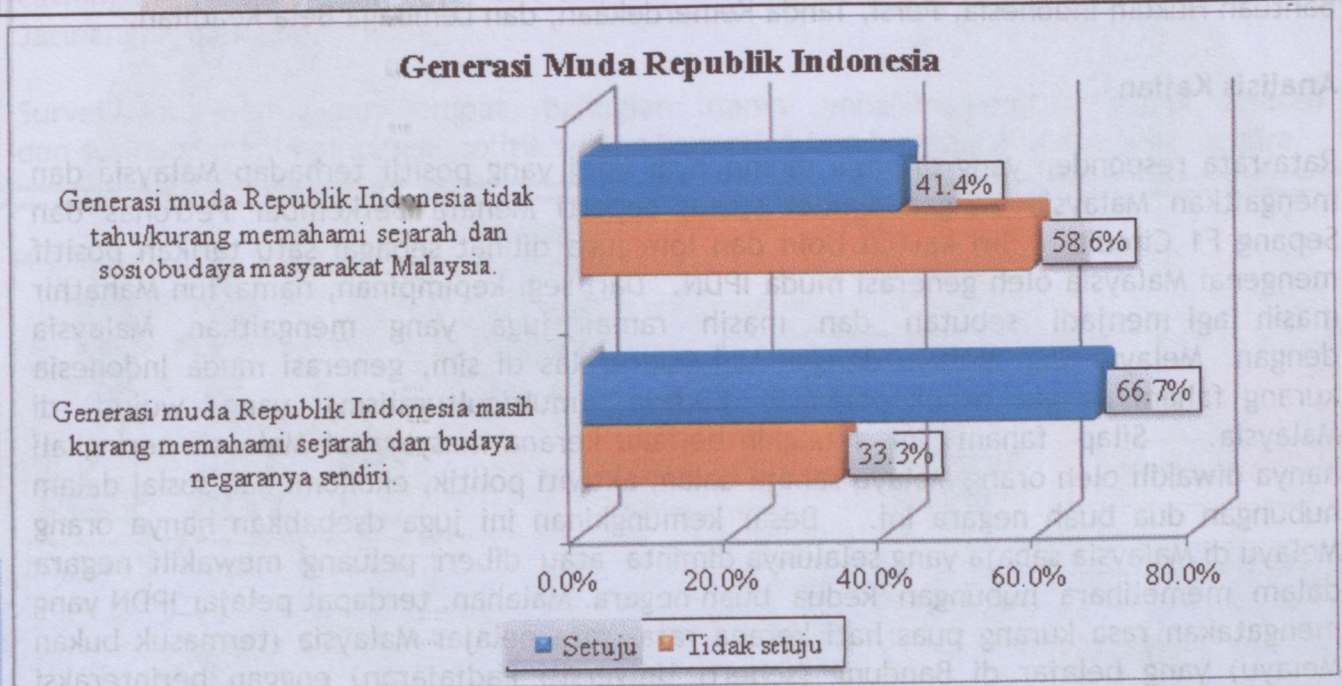
### Analisis Kajian

Rata-rata responden yang ditemui mempunyai imej yang positif terhadap Malaysia dan mengaitkan Malaysia dengan simbol status seperti Menara Berkembar Petronas dan Sepang F1 Circuit. Siri kartun Upin dan Ipin juga dilihat sebagai satu tarikan positif mengenai Malaysia oleh generasi muda IPDN. Dari segi kepimpinan, nama Tun Mahathir masih lagi menjadi sebutan dan masih ramai juga yang mengaitkan Malaysia dengan Melayu dan Melayu dengan Malaysia. Jelas di sini, generasi muda Indonesia kurang faham dengan aspek pelbagai budaya (multiculturalism) yang wujud di Malaysia. Silap faham ini mungkin berlaku kerana masyarakat Malaysia seringkali hanya diwakili oleh orang Melayu sahaja dalam aktiviti politik, ekonomi dan sosial dalam hubungan dua buah negara ini. Besar kemungkinan ini juga disebabkan hanya orang Melayu di Malaysia sahaja yang selalunya diminta atau diberi peluang mewakili negara dalam memelihara hubungan kedua buah negara. Malahan, terdapat pelajar IPDN yang mengatakan rasa kurang puas hati kerana rata-rata pelajar Malaysia (termasuk bukan Melayu) yang belajar di Bandung (seperti Universiti Padjajaran) enggan berinteraksi dengan mereka walau pun berkongsi ruang sosial yang sama. Ada juga yang masih positif dengan konsep serumpun dan persamaan budaya dan tradisi Melayu serta agama Islam. Malaysia juga dilihat sebagai sebuah negara tetangga yang moden dan jauh lebih maju dari Indonesia.



Hampir 60 peratus responden (58.6%) mengakui memahami sejarah budaya Malaysia. Ini merupakan sesuatu yang agak menarik kerana mereka juga mengakui kurang memahami sejarah dan budaya negara mereka sendiri (66.7%) (lihat rajah 1). Sentimen sebegini sememangnya sudah diduga dalam kalangan golongan muda di negara lain yang juga didapati kurang meminati sejarah. Seperti mana yang diamati oleh Benni Indo (2012), generasi muda Republik Indonesia kini seolah-olah banyak melupakan jasa pejuang negara. Menurut beliau lagi, orang muda Indonesia kurang pengetahuan sejarah yang mana turut mengandungi nilai-nilai pembelajaran dan pendidikan yang mengajar erti sebuah kemerdekaan.

Tidak dapat dinafikan, kurangnya pengetahuan serta pemahaman sejarah juga merupakan antara punca utama yang mengeruhkan lagi hubungan Malaysia-Indonesia masa kini kerana kebanyakan tuduhan yang dilemparkan terhadap Malaysia sebagai “Malingsia” atau pencuri dan “mesin fotokopi” mempunyai kaitan dengan sejarah hubungan Malaysia-Indonesia. Pelbagai tradisi dan warisan budaya suku kaum masyarakat Indonesia telah dibawa bersama oleh pendatang atau migran Indonesia yang telah lama berhijrah dan bermastautin di Tanah Melayu. Penghijrahan rakyat khususnya dari Kepulauan Jawa dan Sumatera merupakan satu amalan biasa sebelum berlakunya penjajahan Inggeris dan Belanda dan terus diamalkan sehingga sebelum kemerdekaan Malaysia.



**Rajah 1: Generasi Muda Republik Indonesia dan pemahanam sejarah dan sosiobudaya**



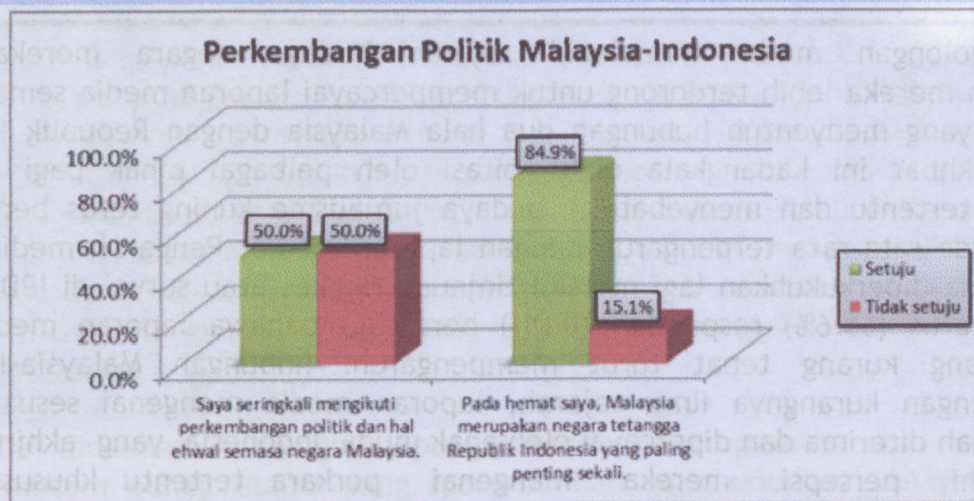
Kegagalan golongan muda memahami sejarah budaya negara mereka sendiri menyebabkan mereka lebih terdorong untuk mempercayai laporan media semasa dalam pelbagai isu yang menyentuh hubungan dua hala Malaysia dengan Republik Indonesia. Kebebasan akhbar ini kadangkala dieksploitasi oleh pelbagai pihak bagi mencapai kepentingan tertentu dan menyebabkan budaya jurnalisme kuning terus berkembang. Golongan muda rata-rata terpengaruh dengan laporan media. Pengaruh media ke atas golongan muda diperkukuhkan lagi melalui tinjauan ringkas atau survei di IPDN apabila lebih 65 peratus (65.6%) responden (IPDN) bersetuju bahawa laporan media massa tempatan yang kurang tepat turut mempengaruhi hubungan Malaysia-Indonesia. Ditambah dengan kurangnya ilmu sejarah, laporan media mengenai sesuatu isu di Malaysia mudah diterima dan dipercayai oleh anak muda Indonesia yang akhirnya turut mempengaruhi persepsi mereka mengenai perkara tertentu khususnya yang menyentuh tentang rakyat Indonesia. Ini jelas apabila sentimen golongan muda Indonesia terhadap Malaysia mengalami gelombang pasang-surut berdasarkan peristiwa semasa dan perkaitannya dengan peranan serta pengaruh media massa. Ringkasnya, golongan muda Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh peristiwa semasa dan juga laporan media massa termasuk tulisan di laman media sosial.

Namun begitu, kita tidak boleh menolak ke tepi sentimen atau pengaruh sejarah sosio budaya dalam menilai persepsi golongan muda Indonesia terhadap Malaysia. Ini kerana apabila di tanya mengenai pandangan pertama mereka berhubung Malaysia, ramai juga yang mengaitkannya dengan isu serumpun, bahasa, adat istiadat dan agama.

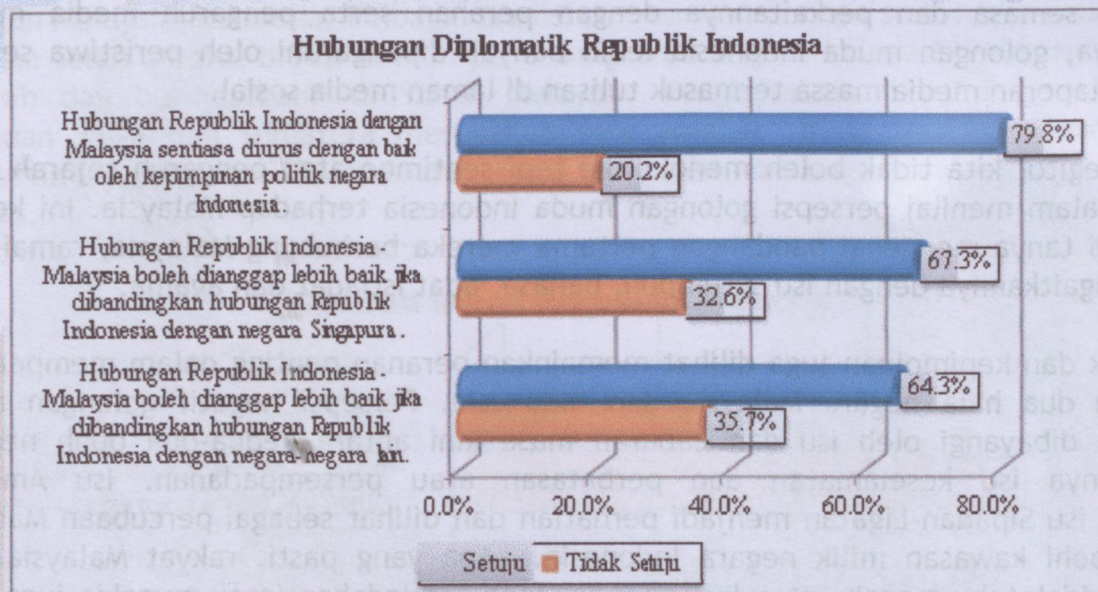
Isu politik dan kepimpinan juga dilihat memainkan peranan penting dalam memperbaiki hubungan dua hala negara Malaysia dan Indonesia. Persepsi negatif golongan muda Indonesia dibayangi oleh isu dan cabaran masa kini antara kedua-dua buah negara, terutamanya isu keselamatan dan perbatasan atau persempadanan. Isu Ambalat termasuk isu Sipadan-Ligatan menjadi perhatian dan dilihat sebagai percubaan Malaysia mencero bohi kawasan milik negara Indonesia. Apa yang pasti, rakyat Malaysia pula didapati tidak tahu menahu atau kurang mendapat pendedahan (atau mungkin juga agak 'oblivious') tentang 'kemarahan' rakyat Indonesia semasa isu Ambalat sedang memuncak pada tahun 2005.

Begitu juga dengan kes yang melibatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Walaupun responden berjaya menyenaraikan isu utama yang menjadi punca konflik antara dua buah negara ini, hanya 50% sahaja responden mengakui mengikuti perkembangan politik dan hal ehwal semasa Malaysia. Apa yang menarik perhatian adalah hampir 85 peratus (84.9%) berpendapat Malaysia merupakan negara tetangga Republik Indonesia yang paling penting. Malahan, rata-rata (67.3%) bersetuju hubungan Malaysia - Indonesia adalah jauh lebih baik berbanding hubungan Republik Indonesia dengan negara tetangga lain seperti Singapura (lihat rajah 2 dan 3).





**Rajah 2: Perkembangan Politik Malaysia-Indonesia**



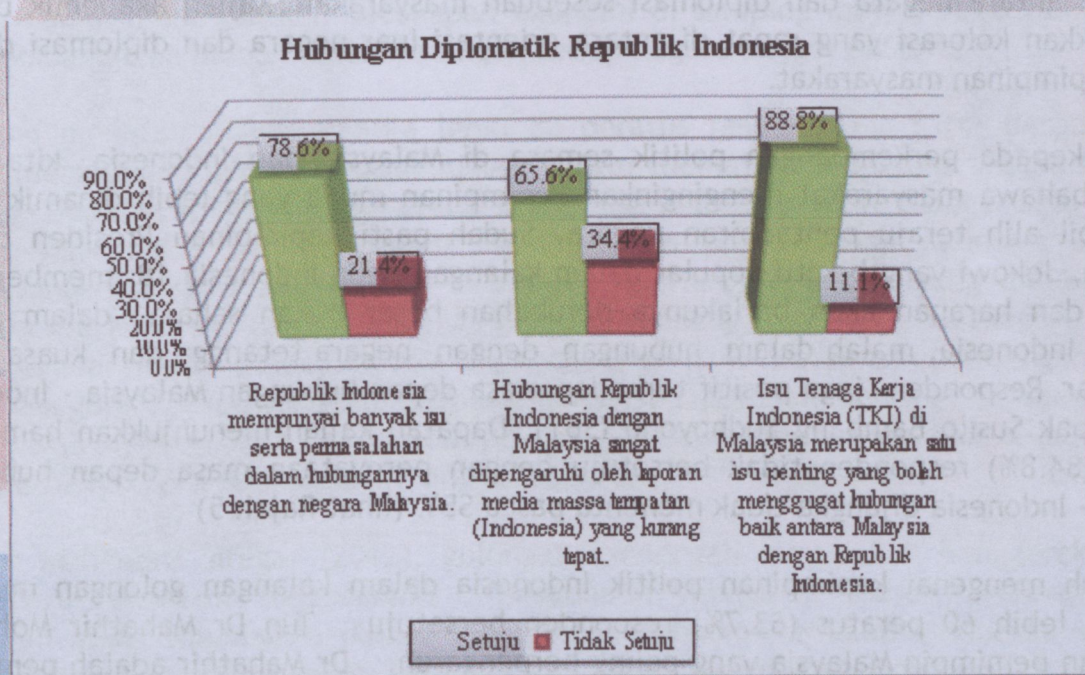
**Rajah 3: Faktor Hubungan Diplomatik Republik Indonesia**

Kepimpinan dilihat sebagai satu faktor perhubungan kedua-dua negara oleh ramai responden (79.8%). Jika ditinjau dengan teliti dalam tempoh lebih lima puluh tahun yang lalu, wujud beberapa indikasi yang menunjukkan hubungan bilateral kedua negara masih berada pada tahap rekonsiliasi<sup>14</sup> terhad. Sekiranya kedua negara mahu melonjakkan hubungan dua hala tersebut ke tahap rekonsiliasi penuh, isu-isu tertangguh dan isu remeh yang menjadi 'duri dalam daging' dalam hubungan dua hala Malaysia-Indonesia harus diatasi (Rizal Sukma 2008). Cabaran ini mungkin dicetuskan oleh kepercayaan bahawa hubungan dua hala Malaysia - Republik Indonesia ini lebih penting berbanding hubungannya dengan negara lain. Adakah ini bererti lebih banyak dugaan dan cabaran yang akan dihadapi oleh kedua-dua negara disebabkan oleh keakraban hubungan mereka? (lihat Rajah 3)



Ini jelas apabila hampir 80 peratus (78.6%) daripada responden bersetuju Republik Indonesia mempunyai banyak masalah dalam hubungannya dengan Malaysia (lihat Rajah 4). Namun begitu, agak ramai responden (lebih 65%) bersetuju isu atau masalah dalam hubungan Malaysia - Republik Indonesia berpunca daripada pengaruh laporan media sosial tempatan yang memberikan maklumat yang kurang tepat atau berat sebelah. Ditanya mengenai TKI, ramai responden (88.8 %) bersetuju isu ini boleh menggugat hubungan kedua-dua negara.

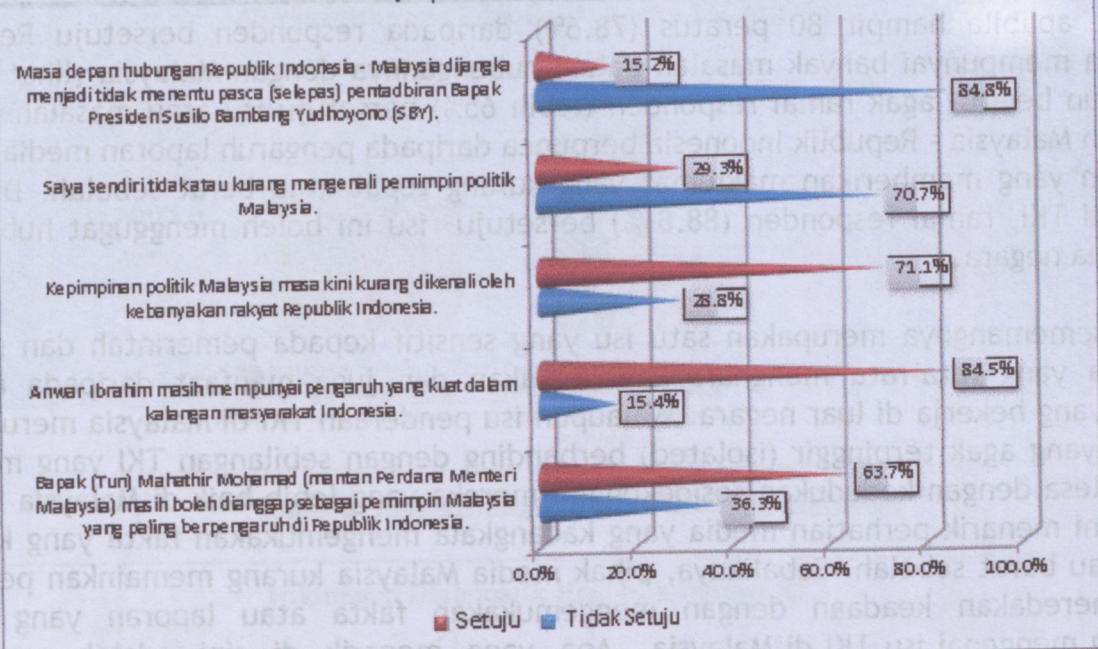
Isu TKI sememangnya merupakan satu isu yang sensitif kepada pemerintah dan rakyat Indonesia yang rata-rata mengharapkan kebaikan dan juga manfaat daripada rakyat mereka yang bekerja di luar negara. Walaupun isu penderaan TKI di Malaysia merupakan satu isu yang agak terpinggir (isolated) berbanding dengan sebilangan TKI yang mampu hidup selesa dengan kedudukan sosioekonomi mereka yang lebih baik di Malaysia tetapi insiden ini menarik perhatian media yang kadangkala mengemukakan fakta yang kurang tepat atau berat sebelah. Sebaliknya, pihak media Malaysia kurang memainkan peranan untuk meredakan keadaan dengan mengemukakan fakta atau laporan yang lebih seimbang mengenai isu TKI di Malaysia. Apa yang menarik di sini adalah sentimen golongan muda yang mempunyai pendirian yang sama dengan lapisan masyarakat lain (mainstream) di Indonesia mengenai isu TKI.



**Rajah 4: Hubungan Diplomatik Republik Indonesia**



### Pemimpin Politik Malaysia - Indonesia



Rajah 5: Faktor Pemimpin Politik Malaysia - Indonesia

Tidak dapat dinafikan faktor kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam hubungan antara negara dan diplomasi sesebuah masyarakat. Kajian akademik banyak menunjukkan klorasi yang rapat di antara orientasi luar negara dan diplomasi dengan faktor kepemimpinan masyarakat.

Merujuk kepada perkembangan politik semasa di Malaysia dan Indonesia, kita sedia maklum bahawa masyarakat menginginkan kepemimpinan muda yang lebih dinamik untuk mengambil alih teraju pentadbiran negara. Sudah pasti kepemimpinan Presiden baharu Indonesia, Jokowi yang begitu popular dalam kalangan belia Indonesia, memberi satu inspirasi dan harapan akan berlakunya perubahan besar bukan sahaja dalam politik domestik Indonesia, malah dalam hubungan dengan negara tetangga dan kuasa-kuasa yang besar. Responden juga positif terhadap masa depan hubungan Malaysia - Indonesia pasca Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dapatan kajian menunjukkan hampir 85 peratus (84.8%) responden tidak bersetuju dengan pernyataan masa depan hubungan Malaysia - Indonesia dijangka tidak menentu pasca SBY. (lihat Rajah 5)

Menyentuh mengenai kepemimpinan politik Indonesia dalam kalangan golongan muda di Indonesia lebih 60 peratus (63.7%) responden bersetuju Tun Dr Mahathir Mohamad merupakan pemimpin Malaysia yang paling berpengaruh. Dr Mahathir adalah pemimpin yang sangat dikenali oleh pelbagai lapisan masyarakat Indonesia. Pada masa yang sama, lebih ramai responden (84.5%) berpandangan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga masih mempunyai pengaruh di Indonesia (lihat rajah 5). Namun, lebih 70 peratus (71.1%) responden berpandangan kepemimpinan politik Malaysia masa kini kurang dikenali oleh masyarakat Republik Indonesia. Sebaliknya, apabila mengukur pandangan individu mengenai perkara ini, ramai (70.7%) tidak bersetuju bahawa mereka kurang mengenali pemimpin politik Malaysia.



Hubungan Malaysia-Indonesia terjalin melalui dua saluran utama iaitu secara bilateral dan multilateral melalui ASEAN. Dalam hal ini, hubungan ekonomi melalui ASEAN dilihat sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi kedua-dua buah negara ini. Salah satu daripada kerjasama antara negara-negara ASEAN yang turut melibatkan Malaysia dan Indonesia adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA).<sup>19</sup> Persetujuan ini dicapai pada tahun 1992 apabila negara-negara ini bersetuju untuk mengurangkan tarif perdagangan antara negara-negara terlibat ini bermula pada tahun 2003. Walau bagaimanapun, ia terhad kepada enam negara awal yang menyertai ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia. Negara-negara lain yang baharu menyertai ASEAN, mengurangkan tarif perdagangannya agak lewat bagi memberikan peluang kepada negara-negara ini bersedia untuk menyertai perdagangan bebas.

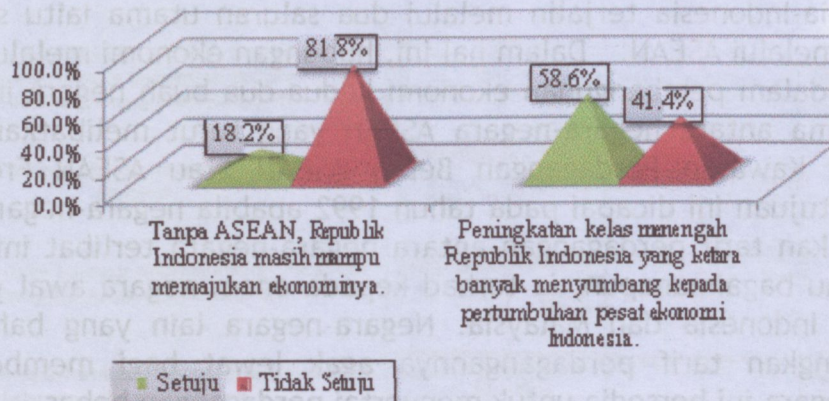
Matlamat utama pelaksanaan AFTA adalah untuk meningkatkan perdagangan antara ASEAN yang dilihat sangat rendah iaitu hanya mewakili 22.3% (1970), 18.6% (1985), 20.1% (1990), 24.3% (1995), 21.9% (1998) dan 23.6% (2000) perdagangan antara negara-negara ASEAN. Oleh itu, adalah diharapkan melalui kerjasama sebegini, negara-negara ASEAN akan mendapat dorongan baru ke arah meningkatkan kerjasama ini. Di samping itu, melalui pembentukan AFTA ini juga, negara anggota ASEAN bersetuju untuk memudahkan prosedur kastam menjalankan penyeragaman piawaian barangan.<sup>21</sup> Hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN yang lain memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecekapan ekonomi di samping mewujudkan persekitaran iklim pembangunan mapan dalam kalangan setiap negara anggota ASEAN.

Apa yang menarik adalah apabila lebih 80 peratus responden (81.8%) berpandangan negara mereka masih memerlukan ASEAN dalam memajukan ekonomi Indonesia (lihat rajah 6). Dapatan ini signifikan kerana ia menggambarkan ASEAN sebagai satu gagasan penting yang kekal relevan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serantau. Perkembangan pesat serta prestasi ekonomi cemerlang Indonesia yang didukung oleh ASEAN berperanan sebagai wacana yang dapat meningkatkan lagi kecekapan ekonomi semua negara anggota. Ekonomi Indonesia yang menjalin hubungan erat dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain dapat memainkan peranan penting. Di samping itu, ASEAN telah mewujudkan persekitaran iklim pembangunan mapan dan sesuai dengan aspek perkembangan setiap negara anggota.

Menurut Mahendra Siregar (2012), golongan menengah merupakan penggerak kepada peningkatan ekonomi Indonesia.<sup>22</sup> Responden mengakui (58.6%) golongan kelas menengah dapat membantu dalam peningkatan ekonomi republik Indonesia. Golongan kelas menengah menjadi salah satu faktor bagi peningkatan penjualan barang dan perkhidmatan dan seterusnya, meningkatkan kedudukan/taraf ekonomi masyarakat (Sasmito Hadiwibowo, 2012).

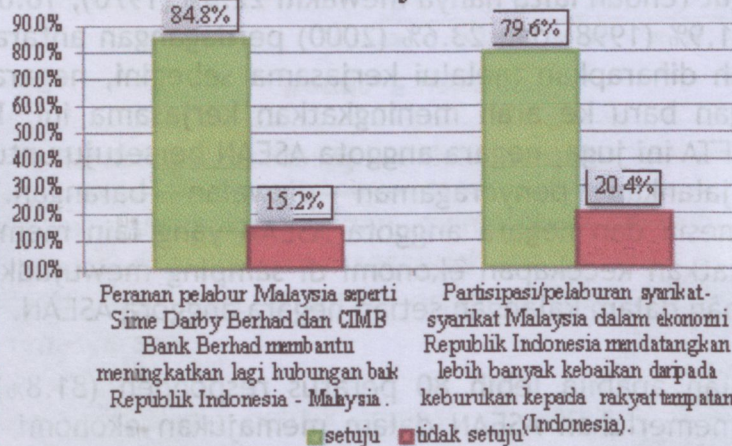


## Ekonomi Indonesia



## Rajah 6: Ekonomi Indonesia

### Pelabur Malaysia - Indonesia



Satu perkembangan positif dalam konteks hubungan bilateral Malaysia - Indonesia adalah dari aspek hubungan ekonominya. Meskipun hubungan politik mengalami pasang surutnya, hubungan ekonomi dua tetangga ini mengalami peningkatan yang memberangsangkan. Kerjasama ekonomi antara Malaysia-Indonesia berlaku secara intensif sejak tahun 2000. Sepanjang tempoh 2002-2009, pelaburan Malaysia di Indonesia bernilai US\$1.5 billion manakala pelaburan Indonesia di Malaysia pula sebanyak US\$354 juta. Malaysia muncul sebagai negara pelabur keempat terbesar di Indonesia pada tahun 2008, manakala Indonesia pula menjadi rakan perdagangan ke-9 terbesar bagi Malaysia.

Interaksi ekonomi wilayah juga semakin meningkat menerusi penyertaan kedua buah negara dalam poligon pertumbuhan ekonomi seperti Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asia Growth Area (BIMP-EAGA).<sup>24</sup> Syarikat Malaysia banyak melibatkan diri dalam sektor perkhidmatan dan juga perladangan di Indonesia. Sebagai contoh, CIMB Niaga dan Maybank merupakan jenama perkhidmatan perbankan yang berjaya mendapat kepercayaan dalam kalangan pengguna di Indonesia. Begitu juga dengan peranan yang dimainkan oleh Air Asia dalam sektor perkhidmatan penerbangan dan secara tidak langsung, menggalakkan pertumbuhan sektor pelancongan Indonesia dan Malaysia.



Air Asia, syarikat penerbangan tambang murah terbaik dunia dan terkemuka Asia ditubuhkan pada tahun 2001 dengan impian untuk membolehkan "semua orang terbang" (Everyone Can Fly). Dengan rangkaian laluan yang meliputi lebih daripada 20 buah negara, AirAsia terus mengorak langkah untuk terus menawarkan penerbangan tambang murah. Salah satu destinasi penerbangan Air Asia yang kerap frekuensinya ialah Bandung. Air Asia menghubungkan Bandung dengan Malaysia (Kuala Lumpur) empat kali sehari menjadikan ramai rakyat Malaysia kerap berulang-alik ke sana. Sime Darby pula merupakan syarikat terbesar Malaysia yang melabur dalam sektor perladangan di Indonesia. Dalam konteks ini, hubungan masyarakat dengan masyarakat (people to people) menjadi bertambah baik apabila lebih ramai rakyat dua negara berpeluang untuk melancong dan melawat antara satu sama lain.

Menyentuh soal penglibatan syarikat Malaysia dalam ekonomi Indonesia, lebih 80 peratus (84.8%) responden percaya Sime Darby dan CIMB Bank Berhad dapat membantu meningkatkan lagi hubungan baik antara Republik Indonesia dan Malaysia. Ramai juga berpandangan (79.6%) pelaburan syarikat-syarikat Malaysia dalam ekonomi Indonesia banyak mendatangkan kebaikan kepada rakyat tempatan (lihat rajah 6). Ini merupakan satu petanda baik/positif kepada syarikat Malaysia yang kini perlu bersaing dengan banyak firma asing yang berhasrat untuk melabur di Republik Indonesia.

Hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia juga merangkumi hubungan dalam sektor pendidikan tinggi. Hubungan ini membabitkan peranan pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia dan juga peranan pelajar Malaysia yang menuntut di Indonesia. Merujuk kepada data Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT), seramai 3,763 pelajar dari Republik Indonesia telah melanjutkan pelajaran mereka di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia, manakala seramai 4,806 pelajar dari Republik Indonesia telah melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di Malaysia pada tahun 2011. Berdasarkan statistik, terdapat pengurangan pelajar berbanding tahun-tahun yang sebelumnya, di mana terdapat seramai 3,769 pelajar Indonesia di IPTA dan 5963 di IPTS (2010), pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajaran mereka di Institusi Perguruan Tinggi di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012 adalah seramai 5914 orang pelajar.

Pelancongan juga merupakan sektor yang aktif dan menjanjikan potensi ekonomi yang begitu besar kepada Malaysia dan Indonesia. Statistik Kementerian Pelancongan Malaysia mencatatkan Indonesia sebagai negara kedua (selepas Singapura) yang mempunyai paling ramai rakyat yang melancong ke Malaysia. Data terkini (2013) mencatatkan sejumlah 2,548,021 pelancong dari Indonesia melawat Malaysia. Boleh dikatakan terdapat peningkatan dalam jumlah dari tahun sebelumnya iaitu seramai 2,382,606 pada tahun 2012.<sup>28</sup> Jumlah rakyat Malaysia yang datang ke Indonesia untuk bercuti juga meningkat dari tahun ke tahun. Data statistik menunjukkan seramai 1,171,737 pelancong Malaysia yang berkunjung ke Republik tersebut pada tahun 2010 dan peningkatan dapat dilihat pada tahun berikutnya iaitu seramai 1,173,351 pada tahun 2011 dan seramai 1,233,897 pada tahun 2012.



## **Generasi Muda Malaysia dan Republik Indonesia dalam Konteks ASEAN Community 2015**

Seandainya golongan belia Indonesia dan Malaysia tidak memahami dan mendalami sejarah dan budaya masing-masing, ia mungkin memberi impak negatif bukan sahaja terhadap hubungan antara dua negara ini tetapi juga terhadap hubungan antara ASEAN. Penglibatan generasi muda dalam konteks ASEAN adalah amat penting dalam mengeratkan hubungan serantau dan juga hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Ada pandangan yang mengatakan pembentukan ASEAN tidak melibatkan generasi muda dan kegagalan ini menimbulkan sikap pasif atau tidak mengambil tahu terhadap aspirasi ASEAN.

Dalam satu kajian lain oleh Benny dan Abdullah (2011)<sup>30</sup>, mereka mendapati sebilangan besar rakyat Indonesia tahu akan pembentukan ASEAN tetapi tidak benar-benar memahami sejarah serta manfaat pembentukannya. Kajian mereka meninjau persepsi dan sikap masyarakat Indonesia terhadap pembentukan ASEAN, khususnya terhadap ASEAN Community 2015. Seramai 75 peratus responden survei ini terdiri daripada generasi muda (18 sehingga 34 tahun) dan kebanyakan mereka mengakui mereka tahu akan ASEAN tetapi tidak memahami ASEAN secara mendalam. Survei ini menunjukkan pengetahuan golongan belia di Indonesia terhadap isu serantau termasuk hubungan intra-ASEAN juga adalah terhad. Pada masa yang sama, ia juga menimbulkan persoalan sama ada rakyat, khususnya generasi muda dari negara anggota ASEAN yang lain, mempunyai tahap kesedaran dan pengetahuan yang sama rendah. Adakah pengetahuan sejarah serantau dalam kalangan golongan belia Malaysia - Republik Indonesia dan negara anggota lain terbatas? Apa yang pasti, tahap pengetahuan dan pemahaman yang rendah tentang sejarah serta intepretasi sejarah yang berbeza akan mempengaruhi hubungan antara negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia. Apa yang dikhuatiri sekiranya tiada sebarang inisiatif oleh kedua-dua pihak untuk mengenali antara satu sama lain, hubungan Malaysia - Indonesia khususnya di peringkat masyarakat dengan masyarakat (people to people) akan terus renggang dan bermasalah dan ini sudah pasti menggugat aspirasi pembinaan ASEAN Community 2015.

### **Rumusan**

Tinjauan awal (survei) kajian ini menunjukkan persepsi generasi muda Indonesia terhadap Malaysia tidak dipengaruhi oleh faktor sejarah semata-mata disebabkan kurangnya pengetahuan sejarah mereka. Apa yang nyata, persepsi responden banyak dipengaruhi isu semasa. Pada masa yang sama, reaksi dan respon generasi muda terhadap isu semasa ini banyak dipengaruhi oleh laporan media perdana dan tabloid Indonesia. Walau bagaimanapun responden didapati masih peka akan persamaan antara kedua-dua negara khususnya dalam aspek serumpun iaitu bahasa, tradisi dan budaya.



Dari segi kepimpinan politik, generasi muda Indonesia berpandangan hubungan diplomatik Malaysia - Indonesia amat penting dan jauh lebih baik berbanding dengan Singapura. Walau pun mempunyai hubungan dua hala yang baik, namun, Malaysia dan Indonesia tidak sunyi dari konflik dan isu semasa yang boleh menimbulkan ketegangan. Isu TKI tetap menjadi isu utama yang dipercayai boleh mengeruhkan hubungan dua tetangga ini. Apa yang menarik adalah walaupun sebilangan besar responden merupakan golongan muda berusia antara 21 -

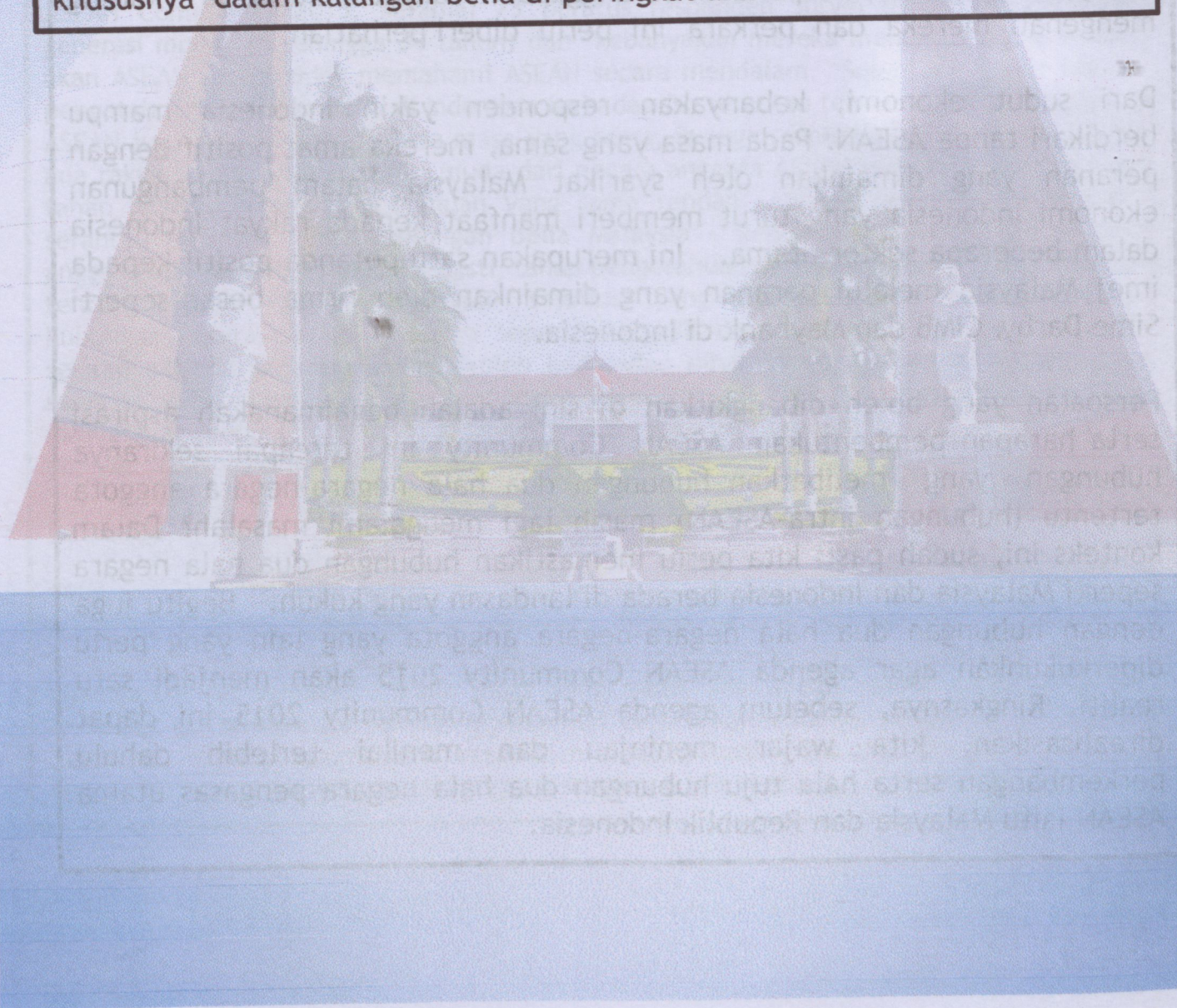
24 tahun dan berpendidikan menengah sahaja, mereka masih mengingat/mengenal lagi pemimpin Malaysia seperti Tun Dr Mahathir dan Anwar Ibrahim. Ini merupakan satu dapatan yang agak menarik kerana Dr Mahathir dan Anwar Ibrahim merupakan dua gandingan pemimpin politik yang pernah menerajui kepimpinan negara Malaysia hampir dua dekad yang lalu. Menyentuh mengenai kepimpinan politik Malaysia masa kini, responden beranggapan rakyat Indonesia kurang mengenali mereka dan perkara ini perlu diberi perhatian.

Dari sudut ekonomi, kebanyakan responden yakin Indonesia mampu berdikari tanpa ASEAN. Pada masa yang sama, mereka amat positif dengan peranan yang dimainkan oleh syarikat Malaysia dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang turut memberi manfaat kepada rakyat Indonesia dalam beberapa sektor utama. Ini merupakan satu petanda positif kepada imej Malaysia melalui peranan yang dimainkan oleh firma besar seperti Sime Darby, CIMB dan Maybank di Indonesia.

Persoalan yang boleh dibangkitkan di sini adalah bagaimanakah aspirasi serta harapan pembentukan ASEAN Community ini tercapai sekiranya hubungan yang melibatkan hubungan dua hala negara-negara anggota tertentu (hubungan intra-ASEAN) masih lagi mengalami masalah? Dalam konteks ini, sudah pasti kita perlu memastikan hubungan dua hala negara seperti Malaysia dan Indonesia berada di landasan yang kukuh. Begitu juga dengan hubungan dua hala negara-negara anggota yang lain yang perlu diperkukuhkan agar agenda ASEAN Community 2015 akan menjadi satu realiti. Ringkasnya, sebelum agenda ASEAN Community 2015 ini dapat direalisasikan, kita wajar meninjau dan menilai terlebih dahulu perkembangan serta hala tuju hubungan dua hala negara pengasas utama ASEAN iaitu Malaysia dan Republik Indonesia.



Sebagaimana yang telah dibangkitkan di awal perbincangan, pandangan dan peranan generasi muda seringkali tidak diambil kira oleh pembuat dasar terutamanya yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dua negara. Pandangan generasi muda tidak boleh diabaikan kerana golongan inilah yang membentuk sebahagian besar populasi masyarakat ASEAN masa kini. Justeru, ASEAN Community 2015 menyediakan satu platform yang baik dalam memupuk nilai kebersamaan dalam konteks transformasi sosioekonomi dan politik masyarakat di rantau Asia Tenggara dalam kalangan generasi muda ASEAN. ASEAN Community 2015 juga boleh dianggap sebagai satu ujian untuk menilai komitmen kepimpinan negara anggota dalam melibatkan partisipasi generasi muda dalam isu keserantau dan antarabangsa. Apa yang pasti, untuk mencapai matlamat ASEAN Community 2015, setiap negara anggota perlu membina jalinan hubungan 'people to people' yang lebih bermakna, khususnya dalam kalangan belia di peringkat akar umbi.





# RUNDOWN KEGIATAN

07.15 - 07.45 WIB	:	PENDAFTARAN PESERTA
07.45 - 07.52 WIB	:	SAMBUTAN TARIAN SELAMAT DATANG OLEH PRAJA
07.52 - 07.55 WIB	:	PEMBUKAAN OLEH MASTER OF CEREMONY
07.55 - 08.00 WIB	:	LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
08.00 - 08.10 WIB	:	LAPORAN PENGANTAR REKTOR IPDN
08.10 - 08.35 WIB	:	PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEKALIGUS MEMBUKA SEMINAR SECARA RESMI
08.35 - 09.50 WIB	:	PANEL 1: KEYNOTE SPEAKER 1: TUN MUSA HITAM (MALAYSIA) KEYNOTE SPEAKER 2: BAPAK TRY SUTRISNO (INDONESIA) MODERATOR: PROF. WIRMAN SYAFRI (IPDN / INDONESIA)
09.50 - 10.00 WIB	:	PENYERAHAN CENDERA MATA DARI REKTOR IPDN KEPADA TUN MUSA HITAM DAN BAPAK TRY SUTRISNO
10.00 - 11.15 WIB	:	PANEL 2: PROF. BAMBANG WIBAWARTA (UI / INDONESIA) PROF. ERMAYA SURADINATA (IPDN / INDONESIA) PROF. KHADIJAH MD KHALID (INPUMA / MALAYSIA) MODERATOR: PROF. SHAKILA YACOB (INPUMA / MALAYSIA)
11.15 - 13.30 WIB	:	BREAK (ISHOMA - ISTIRAHAT, SHALAT, & MAKAN SIANG) DIIRINGI DENGAN LAGU-LAGU YANG DIBAWAKAN OLEH PRAJA IPDN
13.30 - 14.45 WIB	:	PANEL 3 TAN SRI DR SULAIMAN MAHBOB (INPUMA / MALAYSIA) PROF. EMERITUS BENNY H. HOED (UI / INDONESIA) MODERATOR: SUDARMONO, Ph.D. (PEMDA SULSEL / INDONESIA)
14.45 - 14.50 WIB	:	PENYERAHAN CENDERA MATA DAN SERTIFIKAT KEPADA UNDANGAN (PERWAKILAN TAMU DARI MALAYSIA DAN UNIVERSITAS INDONESIA) OLEH PEMBANTU REKTOR I IPDN
14.50 - 15.00 WIB	:	PEMBACAAN DOA
15.00 - Selesai	:	PENUTUPAN ACARA OLEH MASTER OF CEREMONY





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno Telp. (022) 7798252 - 7798253  
Fax. (022) 7798256 Kode Pos 45363  
JATINANGOR - SUMEDANG

Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur Telp. (021) 7805088, 78806944, 7806602  
Fax. (021) 7824157 Kode Pos 12506  
JAKARTA SELATAN

